



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1576, 2021

KEMEN-KP. SKHK. Pedoman Penilaian Kualitas
Hasil Kerja Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS
HASIL KERJA ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis pengusahaan jasa kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disingkat SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan pada instansi pemerintah yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional analis perusahaan jasa kelautan untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
4. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat fungsional analis perusahaan jasa kelautan.
5. Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis perusahaan jasa kelautan.
6. Pejabat Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan analisis perusahaan jasa kelautan.
7. Analisis Perusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan analisis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di

wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja APJK yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung APJK yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja APJK dalam bentuk Angka Kredit.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional APJK.
14. Kinerja APJK adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap APJK pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APJK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APJK.

16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh APJK sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 2

- (1) APJK dalam melaksanakan tugas jabatannya berpedoman pada SKHK.
- (2) SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan tugas jabatan;
 - b. ruang lingkup tugas jabatan;
 - c. Hasil Kerja;
 - d. Angka Kredit;
 - e. tolok ukur; dan
 - f. bukti fisik.
- (3) SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jenjang:
 - a. APJK ahli pertama;
 - b. APJK ahli muda;
 - c. APJK ahli madya; dan
 - d. APJK ahli utama.
- (4) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan target kinerja yang meliputi:
 - a. kinerja utama; dan
 - b. kinerja tambahan.
- (2) Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional APJK yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.
- (3) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis kinerja yang mendorong APJK untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas APJK yang bersangkutan.
- (4) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kegiatan pengembangan profesi dan/atau penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan batasan/cakupan kegiatan yang dilaksanakan untuk masing-masing kinerja utama.

Pasal 5

Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa dokumen sesuai dengan unsur kegiatan utamanya.

Pasal 6

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APJK.

Pasal 7

- (1) Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan penilaian Hasil Kerja.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas pekerjaan berupa ukuran jumlah atau banyaknya Hasil Kerja yang dicapai; dan
 - b. kualitas Hasil Kerja berupa ukuran mutu setiap Hasil Kerja yang dicapai.

Pasal 8

- (1) Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dari setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja APJK meliputi:

- a. kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan
- b. tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 10

Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinilai dengan mempertimbangkan:

- a. rencana SKP APJK; dan
- b. kesesuaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK.

Bagian Kedua

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 11

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.
- (2) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komponen penilaian:
 - a. tolok ukur; dan
 - b. bukti fisik.

Pasal 12

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan apabila:
 - a. tolok ukur sesuai dengan SKHK; dan
 - b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan sangat baik apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan apabila:

- a. tolok ukur sesuai dengan SKHK; dan
- b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.

Pasal 14

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan apabila:

- a. komponen tolok ukur tercapai paling rendah 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.

Pasal 15

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan apabila:

- a. komponen tolok ukur tercapai di atas 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 59% (lima puluh sembilan persen); dan
- b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.

Pasal 16

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e apabila:

- a. komponen tolok ukur tercapai kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- b. format dan bukti fisik tidak sesuai dengan SKHK.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 17

Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa:

- a. APJK harus mencatat atau merekam setiap kegiatan yang dilakukan serta menyimpan dan mendokumentasikan data dukung Hasil Kerja baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam SKP APJK maupun kinerja tambahan;
- b. APJK harus menyampaikan usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai disertai dengan bukti fisik;
- c. Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat Penilai melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 18

Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penilai melalui pejabat pengusul untuk dilakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 19

- (1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap periode penilaian Angka Kredit.
- (2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai dalam rentang periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari dan/atau bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat akhir bulan Februari dan akhir bulan Agustus.

Pasal 20

Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilaksanakan untuk mengevaluasi Kinerja APJK dari setiap butir kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APJK dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian SKP APJK dikalikan dengan target Angka Kredit SKP APJK.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai harus memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional APJK dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional APJK yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap Pejabat Penilai yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai memberikan nilai Angka Kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk dilakukan PAK.

- (8) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja (x) sebagai berikut:
- a. nilai 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq$ 120 (seratus dua puluh) dengan predikat sangat baik diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen);
 - b. nilai 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh) dengan predikat baik diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen);
 - c. nilai 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (sembilan puluh) dengan predikat cukup diberikan Angka Kredit 90% (sembilan puluh persen);
 - d. nilai 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 dengan predikat kurang diberikan Angka Kredit 80% (delapan puluh persen); dan
 - e. nilai < 50 (lima puluh) dengan predikat sangat kurang diberikan Angka Kredit 0% (nol persen).

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Angka Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HASIL KERJA MINIMAL

Pasal 23

- (1) Hasil Kerja Minimal merupakan bagian dari uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib dipenuhi PNS sebelum menduduki Jabatan Fungsional APJK pada jenjang jabatannya.
- (2) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 25

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode jabatan dan apabila belum memenuhi, dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode jabatan.
- (2) Apabila sampai dengan pemberian tambahan 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hasil Kerja Minimal tidak dapat dipenuhi, APJK akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi APJK yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Pasal 27

Kenaikan pangkat pada jenjang Jabatan Fungsional APJK dapat diusulkan setelah dipenuhi Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode pada jenjang jabatan yang diduduki.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR KUALITAS HASIL KERJA JABATAN
 FUNGSIONAL ANALISIS PENGUSAHAAN JASA
 KELAUTAN

A. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

1. Sub Unsur Persiapan Pengusahaan Jasa Kelautan untuk Sumber Daya Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Perairan dan/ atau Yurisdiksi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
1.	Melakukan penyusunan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/ atau yurisdiksi	Uraian kegiatan yang berhubungan dengan rencana kerja pengusahaan jasa sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif yang telah disinkronisasi antar kegiatan. berupa dokumen rencana program/kegiatan tahunan/ dokumen perencanaan/program Pujaman dan/ atau Hibah Luar Negeri (PHLN)/direktif Menteri untuk bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, biofarmakologi dan	Dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/ atau yurisdiksi	2,36	a. Dokumen rencana program yang memuat kegiatan kerja, rencana pembiayaan, mekanisme pelaksanaan program/kegiatan pengusahaan/pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan, output yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Restra KKP), dan direktif Menteri di lengkapi naskah teknokratik	Hardcopy/ softcopy berupa: a. dokumen rencana program b. dokumen rencana kegiatan tahunan APJUK c. dokumen perencanaan nasional d. dokumen program PHLN atau direktif Menteri	001	Abdi Utama	a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/ lembaga b. Peraturan Menteri

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>bioteknologi, wisata bahari, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), sumber daya nonkonvensional di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi</p>			<p>b. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat kerangka kerja, rencana pembiasaan, mekanisme pekerjaan, program/kegiatan pengusahaan/ pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan, output yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, Renstra KKP, dan direktif Menteri</p> <p>c. Dokumen perencanaan yang memuat kerangka kerja, rencana pembiayaan, mekanisme pekerjaan, program/kegiatan pengusahaan/ pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan, output yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, Renstra KKP, dan direktif Menteri</p> <p>d. Program PHLN yang memuat kerangka kerja, rencana pembiayaan, mekanisme pekerjaan, program/kegiatan pengusahaan/ pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan, output yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, Renstra KKP, dan direktif Menteri</p> <p>e. Konsep direktif Menteri yang memuat kerangka kerja, rencana pembiayaan, mekanisme pekerjaan, program/kegiatan pengusahaan/ pemanfaatan sumber daya dan jasa</p>				<p>terkait pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja lingkup KKP</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
2.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Uraian kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi hasil analisis rencana kerja pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif berupa dokumen rencana program/kegiatan tahunan/ dokumen perencanaan/ PHLN/direktif Menteri untuk bangunan dan instalasi laut/bidarmakologi dan bioteknologi/wisata bahari/BMKT/sumber daya nonkonvensional di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi (per substansi)	Dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,57	Dokumen evaluasi hasil analisis dokumen rencana program, dokumen rencana kegiatan tahunan, dokumen rencana program PHLN, direktif Menteri, proposal, kontrak, blue book, readiness criteria, Perjanjian Kerja Sama (PKS), memuat kerangka kerja, rencana pembiayaan, mekanisme program/kegiatan pengusahaan/pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan dilengkapi dengan tujuan dan output sesuai dengan ketentuan	Hardcopy/Softcopy dokumen evaluasi hasil analisis rencana kerja berupa: a. konsep dokumen rencana program b. konsep dokumen rencana kegiatan tahunan c. konsep dokumen perencanaan d. konsep dokumen program PHLN atau direktif Menteri	002	Ahli Muda	Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis
3.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Analisis hasil identifikasi bahan rencana program kegiatan tahunan/bahan dokumen perencanaan, untuk bangunan dan instalasi laut/reklamasi/pemanfaatan air laut/bidarmakologi/bioteknologi/wisata bahari/BMKT/sumber daya non konvensional per substansi berupa: a. penyusunan kerangka acuan kerja Term of	Laporan analisis rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,31	Laporan analisis berupa konsep kerangka acuan kerja term of reference, rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana operasional kegiatan sesuai standar dan ketentuan serta bahan input dalam aplikasi terkait rencana kerja di level KKP dan Kementerian Keuangan	Hardcopy/softcopy laporan analisis konsep kerangka acuan kerja atau term of reference, rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana anggaran riil, rencana kerja, data bahan untuk aplikasi terkait rencana kerja	003	Ahli Muda	Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	BASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
4.	Melakukan identifikasi bahan rencana kerja pelaksanaan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	<p>Reference</p> <p>b. rincian anggaran biaya rencana kerja dan bahan data terkait rencana kerja</p> <p>Identifikasi bahan rencana kegiatan dokumen perencanaan, untuk bangunan instalasi dan laut/reklamasi/permanfaatan air laut/bidarmakologi/bioteknologi laut/wisata</p> <p>bahan/BMKT/sumber daya non konvensional berupa data kuantitatif, data kuantitatif, tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan sesuai dengan kebutuhan penyusunan Kerangka Acuan Kerja atau <i>Term of Reference</i> Rincian Anggaran Biaya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga</p>	Laporan identifikasi rencana kerja perngusahaan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,29	Laporan hasil identifikasi bahan dapat berupa: a. data kuantitatif, data kuantitatif dan peraturan perundang-undangan. b. resume hasil identifikasi penyajian data yang dapat berupa tabulasi data atau grafik.	Hard copy/soft copy Laporan identifikasi berupa data kuantitatif, tabulasi data, grafik, tabel dan data peraturan perundang-undangan	004	Abdi Pertama	<p>kemeterian/ lembaga</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran KKP</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja lingkup KKP</p> <p>a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran KKP</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja lingkup KKP</p>
5.	Melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan jasa kelanjutan untuk	<p>Rencana operasional kegiatan, metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>a. metode dan tahapan pelaksanaan jasa kelanjutan untuk kegiatan</p> <p>b. jadwal kegiatan</p>	Dokumen detail rencana pelaksanaan jasa kelanjutan untuk	0,79	Rencana operasional kegiatan, memuat: a. uraian kegiatan b. metode pengumpulan data dan tahapan	Hard copy/soft copy dokumen Rencana Operasional Kegiatan dan Manajemen Risiko	005	Abdi Utama	<p>a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	<p>schedule), rencana penggerakan personal, rencana penggerakan sarana prasarana/peralatan, anggaran dan serapan, monitoring dan evaluasi, kegiatan pengusahaan jasa kelautan bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, bioteknologi dan BMKT, dan sumber daya nonkomersial, yang telah distrukturisasi antar kegiatan</p>	sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil		<p>d. jadwal kegiatan (time schedule) e. rencana penggerakan personal f. rencana penggerakan sarana prasarana/peralatan g. rencana penggunaan anggaran dan serapan h. monitoring dan evaluasi</p>				nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga b. Peraturan Menteri terkait pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran KKP c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan di lingkungan KKP
6.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Evaluasi hasil analisis berupa konsep rencana operasional kegiatan, meliputi: a. metode dan tahapan pelaksanaan, b. jadwal kegiatan (time schedule), c. rencana penggerakan personal, d. rencana penggerakan sarana prasarana/peralatan, anggaran dan serapan, monitoring dan evaluasi, e. rencana penggerakan personal, rencana penggerakan sarana prasarana/peralatan, anggaran dan serapan, monitoring dan evaluasi, kegiatan pengusahaan jasa kelautan bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, bioteknologi dan BMKT, dan sumber daya nonkomersial, yang telah distrukturisasi antar kegiatan	Dokumen evaluasi rencana pelaksanaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,58	Evaluasi hasil analisis berupa: a. konsep rencana operasional kegiatan, memuat: 1. metode dan tahapan pelaksanaan 2. jadwal kegiatan (time schedule) 3. rencana penggerakan personal 4. rencana penggerakan sarana prasarana/peralatan 5. rencana penggunaan anggaran dan serapan 6. monitoring dan evaluasi b. konsep manajemen risiko	Hard copy/soft copy dokumen berupa a. konsep rencana operasional kegiatan b. manajemen risiko	006	Ahli Madya	<p>a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga b. Peraturan Menteri terkait pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran KKP c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan di lingkungan KKP</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	BASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
7.	Melakukan analisis hasil identifikasi beban detail rencana pelaksanaan perusahaan untuk keperluan sumber daya kelurahan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Analisis hasil identifikasi detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelurahan meliputi: a. kebutuhan penyusunan metode, penyusunan kebutuhan pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, kebutuhan penyusunan Jadwal Kegiatan (Time Schedule), d. kebutuhan penyusunan Rencana Pengerahan Persmil, e. kebutuhan penyusunan Rencana kebutuhan Pengerahan Sarana Prasarana/Peralatan, f. kebutuhan penyusunan Rencana Pengerahan Anggaran dan sermapan, g. kebutuhan penyusunan monitoring dan evaluasi kegiatan perusahaan jasa kelurahan bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, biofarmakologi dan bioteknologi, wisata bahari, BMKT, dan sumber daya non konvensional.	Laporan analisis detail pelaksanaan perusahaan pengusahaan jasa kelurahan untuk keperluan sumber daya kelurahan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,34	Laporan hasil analisis detail rencana pelaksanaan, meliputi: a. kebutuhan penyusunan metode, pelaksanaan, kebutuhan jadwal kegiatan (time schedule), c. kebutuhan rencana pengerahan persmil, d. kebutuhan rencana pengerahan sarana prasarana/ peralatan, e. kebutuhan rencana pengerahan anggaran dan sermapan, f. kebutuhan monitoring dan evaluasi	Hard copy/soft copy Laporan Analisis Hasil	007	Abdi Muda	intern pemerintah di lingkungan KKP a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional) terkait tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/kem banga b. Peraturan Menteri Menteri terkait pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran KKP c. peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sistem pengendalian intern
8.	Melakukan identifikasi beban detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa untuk keperluan sumber daya kelurahan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau	Identifikasi detail rencana pelaksanaan mencakup: a. identifikasi bahan-bahan yang diperlukan yang ditetapkan, serta menyajikan data mencakup data kualitatif, tabulasi data, kuantitatif, tabulasi data,	Laporan identifikasi detail rencana pelaksanaan perusahaan pengusahaan jasa kelurahan untuk keperluan sumber daya kelurahan, pesisir dan pulau-pulau	0,29	Laporan hasil identifikasi, memuat: a. hasil rekrenasi terkait referensi/pedoman/juknis/juklak yang digunakan b. identifikasi kondisi dan aksesibilitas lokasi c. identifikasi sdm yang	Hard copy/soft copy Laporan identifikasi hasil	008	Abdi Permana	Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	yuridiksi	grafik, tabel, data peraturan perundang-undangan	kecil di wilayah perairan dan/atau yuridiksi		<p>terlibat</p> <p>d. identifikasi sarana dan pemasama yang diperlukan, mobilisasi alat, logistik, akomodasi transportasi</p> <p>e. identifikasi sumber pembiayaan, harga satuan, survei pasar</p> <p>f. hasil penyajian data antara lain berupa data kualitatif, data kuantitatif, tabulasi data, grafik, tabel, data peraturam perundang-undangan sesuai SOP, standar dan kebutuhan penyusunan bahan sesuai dengan kebutuhan penyusunan</p>				<p>penggunaan nasional terkait tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran KKP</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sistem pengendalian intern</p>

2. Sub Unsur Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Kelautan untuk Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Perairan dan/atau Yurisdiksi

NO.	KEGIATAN TUJAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUJAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
1.	Melakukan penyusunan peta jalan (<i>roadmap</i>) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Roadmap pengusahaan jasa kelautan secara komprehensif mencakup kegiatan: a. menyusun kerangka konsep/kerangka pikir (<i>framework</i>)/kerangka kerja b. revisi hasil evaluasi bahan penyusunan peta jalan c. koordinasi dan konsultasi publik d. perumusan <i>roadmap</i> bidang bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemukiman air laut, bioteknologi dan bioteknologi, wisata bahari, BMKT, sumber daya nonkonvensional per periode e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Kerja Pemerintah f. Rencana Pembangunan Tahunan KL (Renja KL)	Dokumen konsep peta jalan (<i>roadmap</i>) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,84	Dokumen konsep peta jalan (<i>roadmap</i>) pengusahaan jasa kelautan menurut: a. revisi terhadap capaian target pelaksanaan kegiatan sebelumnya b. analisis lingkungan strategis yang memuat inventarisasi dan analisis data hasil pengolahan data indikator dan target yang akan dicapai per periode pelaksanaan, manajemen pelaksanaan, pencapaian target (metode, biaya, SDM, pihak terlibat) c. pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Hard copy/soft copy dokumen berupa peta jalan (<i>roadmap</i>) per periode	009	Ahli Utama	a. undang-undang terkait sistem perencanaan pembangunan nasional b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ) c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) d. Rencana Kerja e. Peraturan (RKP) f. Rencana Pembangunan Tahunan KL (Renja KL)
2.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan peta jalan	Konsep <i>roadmap</i> pengusahaan jasa kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di	Dokumen evaluasi peta jalan (<i>roadmap</i>)	0,81	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan penyusunan peta jalan berupa draft konsep	Hard copy/soft copy Dokumen evaluasi berupa draft konsep	010	Ahli Madya	a. undang-undang terkait sistem perencanaan pembangunan nasional

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	roadmap pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang mencakup kegiatan penyusunan konsep peta jalan, memuat kegiatan a. koordinasi dan identifikasi permasalahan melalui pertemuan atau FGD b. reviu dokumen c. menyusun indikator bidang bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, bioteknologi dan BMKT, sumber daya nonkonvensional per periode	pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		Peta Jalan/Roadmap per periode, yang memuat: a. reviu terhadap capaian target pelaksanaan kegiatan sebelumnya; b. permasalahan indikator dan target yang akan dicapai per periode d. Langkah/strategi pelaksanaan, manajemen pelaksanaan, pencapaian target (mode, biaya, SDM, pihak terlibat, jangka waktu) e. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman	Peta Jalan/Roadmap per periode per bidang			b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) d. Rencana KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Pembangunan Tahunan KL (Renja KL)
3.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Analisis hasil identifikasi bahan penyusunan roadmap mencakup: a. verifikasi data b. analisis kesesuaian target peluang, strategi, metode, biaya, SDM pihak yang terlibat dalam pengusahaan jasa kelautan pada bidang bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, bioteknologi dan BMKT, sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,56	Laporan analisis hasil identifikasi bahan peta jalan (roadmap) memuat analisis: a. kesesuaian target b. data sebelum dan kondisi saat ini c. potensi sumber daya d. indikator pencapaian e. data untuk kebutuhan uraian pelaksanaan	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis bahan peta jalan (roadmap)	011	Ahli Muda	a. undang-undang terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) d. Rencana KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Pembangunan Tahunan KL (Renja KL)
4.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di	Identifikasi peta jalan mencakup: a. identifikasi penyusunan resume bahan penyajian data sebagai bahan penyusunan konsep	Laporan identifikasi peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan,	0,23	Laporan hasil identifikasi bahan memuat: a. uraian kegiatan b. metode pengumpulan data hasil identifikasi bahan dapat berupa data kuantitatif, data kualitatif,	Hard copy/soft copy hasil identifikasi	012	Ahli Pertama	a. undang-undang terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	a. perumusan Rancangan b. PGD c. penyusunan draft Akademik/ Akademik d. penyusunan draft kriteria teknis, (pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia/ modul pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut)	analisis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut		kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut yang telah dilakukan FGD disertai draft kajian akademik/ naskah akademik berupa draft pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia/ modul, memuat: a. draft kriteria teknis yang memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis yang memuat: b. draft naskah akademik, yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, permasalahan, matakuliah dan tujuan 2. latar belakang, dan metode dan metodologi 3. penelitian dan kajian teoritis 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi muatan 7. penutup	Teknis draft Akademik			b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain urusan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
7.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan a. pengumpulan/ klasifikasi b. analisis deskriptif sesuai kebutuhan penyusunan draft Naskah Akademik c. analisis deskriptif penyusunan draft kriteria teknis (pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ kriteria teknis)	Laporan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	0,58	Laporan hasil analisis memuat: a. hasil pengumpulan/ resume materi penyusunan b. hasil analisis deskriptif sesuai kebutuhan	Hard copy/ soft copy Laporan hasil analisis	015	Abdi Mada	1. Undang-undang terkait cipta kerja 2. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain urusan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota 3. Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		Standar Nasional Indonesia/modul pendidikan/penempatan, pembongkaran bangunan dan instalasi laut							terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penzaman berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
8.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi referensi b. merangkum sebagai draft akademik/naskah akademik dan draft kriteria teknis umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/teknis/Standar Nasional Indonesia/modul pengelolahan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan identifikasi bahan kriteria pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	0,35	Laporan hasil identifikasi memuat: a. hasil inventarisasi referensi, mencakup data kualitatif, data kuantitatif, tabulasi data, grafik, tabel, data penunjang sesuai kebutuhan penyusunan draft kriteria teknis b. resume referensi	Hard copy/soft copy hasil identifikasi	016	Ahli Pertama	a. Peraturan Pemerintah terkait Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penzaman berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
9.	Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	Kriteria teknis pengelolaan reklamasi, berupa perencanaan (penentuan lokasi, studi kelayakan rencana induk, studi kelayakan reklamasi, penyusunan anggaran detail), pelaksanaan reklamasi, monitoring dan evaluasi, relokasi dan kompensasi kegiatan reklamasi, sumber material (kelayakan lokasi, jenis material, pengangkutan) dan pengelolaan reklamasi	Dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi	1,00	Dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pertunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul yang telah dilakukan konsultasi publik disertai Kajian Akademik/Naskah Akademik yang terdiri dari: a. Dokumen kriteria teknis yang memuat: i. ruang lingkup	Hard copy/soft copy a. kriteria teknis b. naskah akademik	017	Ahli Utama	a. Peraturan Presiden terkait Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait penanganan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil c. Peraturan Menteri terkait Penunjuk Teknis Muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>bahan hasil reklamasi yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja FGD konsultasi publik finalisasi dokumen berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pe tujuak teknis/Standar Nasional Indonesia / modul dan kajian akademik/naskah akademik 	<p>Dokumen hasil evaluasi analisis pengeloban reklamasi</p>	0,66	<ol style="list-style-type: none"> dasar hukum latih dan definisi ketentuan umum ketentuan teknis naskah akademik, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup belakng, permasalahan, maksud dan tujuan pendekatan dan metodologi kajian teoritis landasan kajian ruang lingkup materi muatan penutup 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> draft Kriteria Teknis draft Naskah Akademik 	018	Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden terkait Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri terkait penataan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri terkait Petunjuk Teknis Muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Keputusan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengeloban ruang laut
10.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengeloban reklamasi	<p>Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perumusan rancangan FGD penyusunan draft Kajian akademik/naskah akademik penyusunan draft kriteria teknis <p>(pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia/ modul) pengeloban reklamasi.</p>	<p>Dokumen hasil evaluasi analisis pengeloban reklamasi</p>	0,66	<p>Dokumen (evaluasi) hasil analisis berupa konsep/draft kriteria teknis pengeloban reklamasi yang telah dilakukan FGD disertai kajian akademik/naskah akademik berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia/modul, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> draft kriteria teknis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup dasar hukum latih dan definisi ketentuan umum ketentuan teknis draft naskah akademik, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup latih belakng, permasalahan, maksud dan tujuan 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> draft Kriteria Teknis draft Naskah Akademik 	018	Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden terkait Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri terkait penataan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri terkait Petunjuk Teknis Muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Keputusan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengeloban ruang laut

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
11.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamas	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. pengelompokan/ klasifikasi b. analisis deskriptif sesuai kebutuhan penyusunan draft naskah akademik, penyusunan draft kriteria teknis (pedoman umum/ pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia)/ modul pengelolaan reklamas	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamas	0,59	3. pendataan dan metodologi 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi muatan 7. penutup Laporan hasil analisis, meliputi: a. hasil pengelompokan/ resume materi penyusunan hasil analisis deskriptif sesuai kebutuhan	Hard copy /soft copy laporan hasil analisis	019	Ahli Muda	a. Peraturan Presiden terkait reklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait petizinan reklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil c. Peraturan Menteri terkait petunjuk teknis muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Keputusan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut
12.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamas	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi referensi b. merangkum sebagai bahan draft naskah akademik/ naskah akademik dan draft kriteria teknis (pedoman umum/ pedoman teknis/ pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia) pengelolaan reklamas berupa: perencanaan (penentuan lokasi, penyusunan	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan reklamas	0,48	Laporan hasil identifikasi referensi, mencakup data kualitatif, data kuantitatif, tabulasi data, grafik, tabel, data penunjang sesuai kebutuhan penyusunan draft kriteria teknis b. resume referensi	Hard copy/soft copy laporan identifikasi	020	Ahli Pertama	a. Peraturan Presiden terkait reklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait petizinan reklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil c. Peraturan Menteri terkait petunjuk teknis muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Keputusan terkait yang

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>rencana induk, studi kelayakan reklamas, penyusunan rancangan detail), pelaksanaan reklamas, monitoring dan evaluasi, relokasi dan kompensasi kegiatan reklamas, sumber material (kelayakan lokasi, jenis material, pengam bilan dan pengangkutan) pengeblasan lahan hasil reklamas)</p>							<p>diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelanaan ruang laut</p>
13.	Melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	<p>Kriteria teknis pemanfaatan air laut, berupa perencanaan (penentuan lokasi bahan baku), penyusunan rencana induk produksi/ pemanfaatan air laut, produk/ ekstraksi pemanfaatan air laut (antara lain: desalinasi, air laut dalam (ALD), garam dan mineral lainnya), pemanfaatan air laut sebagai media/jasa lainnya lain: cooling water, penkangan budidaya, dan kegiatan lainnya), monitoring dan evaluasi) mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perancangan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework) FGD konsultasi publik finalisasi dokumen berupa: pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pe tujuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul dan kajian akademik/ naskah akademik 	Dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut	0,91	<p>Dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut berupa pedoman umum/ pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ Standar Nasional Indonesia/ modul yang telah dilakukan konsultasi publik disertai kajian akademik/ naskah akademik yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumen kriteria teknis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup dasar hukum istilah dan definisi keterkaitan umum keterkaitan teknis naskah akademik, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup belakng, dan tujuan dan tujuan dan metode/ metodologi latar belakang, maksud dan tujuan, dan landasan kajian pendekatan dan landasan kajian ruang lingkup materi muatan penutup 	Hard copy/ soft copy a. kriteria teknis b. naskah akademik	021	Ahli Utama	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang terkait cipta kerja Penetapan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, daerah dan pemerintah daerah Penetapan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Penetapan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan, berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Standar Nasional terkait pemantauan air laut

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
14.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan: a. perumusan rancangan b. FGD c. penyusunan draft kajian akademik/ d. penyusunan draft kriteria teknis (pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pe-tunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia)/ modul pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut	0,69	Dokumen evaluasi hasil analisis berupa konsep/ draft kriteria teknis pemanfaatan air laut yang telah dilakukan FGD disertai kajian akademik/naskah akademik berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul memuat: a. draft kriteria teknis yang memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis b. draft naskah akademik, yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, permasalahan, matakawad dan tujuan dan pendekatan metodologi 2. latar belakang, kajian teoritis 3. pendekatan dan kajian teoritis 4. landasan kajian ruang lingkup materi muatan 5. penutup	Hard copy / soft copy a. draft kriteria teknis b. draft naskah akademik	022	Abli Madya	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Standar Nasional Indonesia terkait pemanfaatan air laut
15.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. pengelompokan/klasifikasi b. analisis deskriptif sesuai kebutuhan penyusunan draft naskah akademik, kriteria teknis (pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	0,63	Laporan hasil analisis, memuat: a. hasil pengelompokan/ resume materi penyusunan hasil analisis deskriptif sesuai kebutuhan	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	023	Abli Madya	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		Nasional (Indonesia) / modul pemanfaatan air laut berupa penentuan lokasi bahan baku, penyusunan rencana induk produksi/pemanfaatan air laut							terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penzinaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Standar Nasional Indonesia terkait pemanfaatan air laut
16.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi referensi b. merangkum sebagai bahan draft akademik/naskah akademik dan draft kriteria teknis (pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia) pemanfaatan air laut, mencakup: penentuan lokasi bahan baku, penyusunan rencana produk/ekstraksi pemanfaatan air laut (antara lain: desalinasi, air laut dalam (ALD), garam dan mineral lainnya), pemanfaatan air laut sebagai media/jasa antara lain: cooling water, perikanan budidaya, dan kegiatan lainnya), monitoring dan evaluasi)	Laporan hasil identifikasi bahan, memuat: a. hasil inventarisasi pemanfaatan air laut b. resume referensi	0,21	Laporan hasil identifikasi bahan, memuat: a. hasil inventarisasi pemanfaatan air laut b. resume referensi	Hard copy/soft copy laporan dan difikasi	024	Ahli Pertama	a. Undang-undang terkait cipta kerja Peraturan Menteri terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penzinaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Standar Nasional Indonesia terkait pemanfaatan air laut
17.	Melakukan penyusunan kriteria teknis	Kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi	Dokumen kriteria teknis	0,91	Dokumen kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi	Hard copy/soft copy a. kriteria teknis	025	Ahli Utama	a. Undang-undang terkait cipta kerja

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	laut, berupa: biota laut sebagai bahan baku, produk/ekstraksi pemanfaatan sumber daya biota laut, perencanaan (perencanaan bisnis, pelaksanaan metode, teknologi pemanfaatan sumber daya biota laut), Pembiayaan dan Investasi, Monitoring dan evaluasi mencakup: <ol style="list-style-type: none"> perancangan kerangka konsep, kerangka pikir/kegiatan kerja (logical framework) FGD konsultasi publik finalisasi dokumen berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/peraturan teknis/ standar nasional Indonesia/modul dan kajian akademik/naskah akademik 	pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut		dan bioteknologi laut berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/peraturan teknis/Standar Nasional Indonesia/ modul yang telah dilakukan konsultasi publik disertai kajian akademik/naskah akademik yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> dokumen kriteria teknis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup dasar hukum istilah dan definisi ketentuan umum kegiatan teknis naskah akademik yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup belakang, permasalahan, maksud dan tujuan pendekatan metodologi dan kajian teoritis landasan kajian ruang lingkup materi muatan penutup 	b. naskah akademik		<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota Penetapan Pemerintah terkait penyerenggaraan bidang kelautan dan perikanan Penetapan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyerenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan 	
18.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> perumusan rancangan FGD penyusunan draft kajian akademik/naskah akademik penyusunan draft kriteria teknis pedoman umum/pedoman 	Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	0,85	Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan bioteknologi laut, yang telah dilakukan FGD disertai draft akademik/naskah akademik berupa draft pedoman umum/pedoman teknis/peraturan teknis/	<ol style="list-style-type: none"> Hard copy/ soft copy draft teknis akademik draft naskah akademik 	026	Abli Madya	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang terkait cipta kerja Penetapan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota Penetapan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
19.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan	teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Indonesia/modul pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria pemanfaatan bioteknologi laut	0,61	Standar Nasional Indonesia/modul memuat: a. draft kriteria teknis yang memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis b. draft naskah akademik, yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, latar permasalahan, maksud dan tujuan dan metodologi 2. kajian teoritis 3. landasan kajian 4. ruang lingkup materi muatan 5. penutup	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	027	Ahli Muda	terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berbasis risiko sektor

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
22.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	<p>mendayung (boating), berlayar (sailing), kayaking, selancar (surfing), parasailing, sea riding, dan</p> <p>e. pengamatan biota, wisata wisata mangrove, voli pantai, berjemur (sun bathing), sepeda pantai yang feasible dan berkelanjutan, mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework) FGD konsultasi publik finalisasi dokumen berupa: pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul dan kajian akademik/masalah akademik 	Dokumen hasil evaluasi analisis pengelolaan wisata bahari	0,72	<p>yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumen kriteria teknis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup dasar hukum istilah dan definisi keterkaitan umum keterkaitan teknis maslah akademik yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup belakang, permasalahan, maksud dan tujuan pendekatan dan metodologi kajian teoritis landasan kajian ruang lingkup materi muatan penutup 	Hard copy/ soft copy <ol style="list-style-type: none"> draft kriteria teknis draft naskah akademik 	030	Abli Madya	<p>menyelaraskan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan Penaturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi penaman untuk pariwisata alam perairan</p>
		<p>Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan rancangan FGD penyusunan draft kajian akademik/ naskah akademik penyusunan draft kriteria teknis <p>(pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia) pengelolaan</p>	Dokumen hasil analisis pengelolaan wisata bahari	0,72	<p>Dokumen evaluasi hasil analisis berupa konsep/draft kriteria teknis yang telah dilakukan FGD disertai kajian akademik/ naskah akademik berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul/keterangan teknis memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> draft kriteria teknis yang 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> draft kriteria teknis draft naskah akademik 	030	Abli Madya	<p>a. Penaturan Menteri terkait penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial</p> <p>b. Penaturan Menteri terkait desa wisata bahari</p> <p>c. penaturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
23.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	wisata bahari Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. pengelompokan/klasifikasi, b. analisis deskriptif sesuai kebutuhan penyusunan draft naskah akademik, penyusunan draft kriteria teknis pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia) pengelolaan wisata bahari	Laporan analisis identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	0,55	memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis b. draft naskah akademik yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, latar permasalahan, maksud dan tujuan dan metode dan kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi muatan 7. penutup	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	031	Ahli Muda	pedoman destinasi pariwisata berkeanjutan Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan a. Peraturan Menteri terkait penanggulangan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial b. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari c. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkeanjutan d. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan a. Peraturan Menteri terkait penanggulangan ikan
24.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan	Hasil identifikasi bahan yang mencakup:	Laporan identifikasi	0,34	Laporan hasil identifikasi memuat	Hard copy/soft copy laporan	032	Ahli Pertama	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	a. inventarisasi referensi b. merangkum sebagai bahan draft kajian akademik/naskah akademik dan draft kriteria teknis (pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul pengelolaan wisata bahari)	bahan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari		a. hasil inventarisasi referensi, mencakup data kuantitatif, data kualitatif, tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan sesuai kebutuhan penyusunan draft kriteria teknis b. resume referensi	identifikasi			dan/atau pembudayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial b. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari c. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkeadilan Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan
25.	Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Kriteria teknis pengelolaan BMKT, berupa: a. perencanaan pengelolaan, yang meliputi rencana pengembalian, sarana dan prasarana, sumber daya manusia/personal, risiko yang ditimbulkan dengan kondisi lokasi pengangkutan, penanganan di atas kapal dan rehabilitasi ekosistem pada lokasi pengangkutan. b. pendayagunaan BMKT yang meliputi BMKT yang nonBMN seperti wisata/ konservasi dan BMKT yang berstatus BMN yaitu pemanfaatan antara lain melalui koleksi negara, hibah dan/atau	Dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT	1,00	Dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/ modul yang telah dilakukan konsultasi publik disertai kajian akademik/naskah akademik yang terdiri dari: a. dokumen kriteria teknis yang memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. landasan dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis b. naskah akademik yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, latar permasalahan, maksud	Hard copy/ soft copy a. kriteria teknis b. naskah akademik	033	Abdi Utama	a. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Keputusan Menteri terkait ketentuan teknis perizinan survei dan perizinan pengangkutan benda berharga asal

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>pendahatanganan BMKT, seperti tukar menukar, monitoring dan evaluasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>) 2. FGD 3. konsultasi publik 4. finalisasi dokumen berupa: pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/peunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia/ modul dan kajian akademik/naskah akademik 	Dokumen hasil evaluasi analisis pengembangan BMKT	0,71	<p>dan tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pendekatan metodologi 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi 7. penutup 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft kriteria teknis b. draft naskah akademik 	034	Ahli Madya	<p>muatan kapal yang tenggelam</p>
26.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	<p>Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan rancangan b. FGD c. penyusunan draft kajian akademik/ naskah akademik d. penyusunan draft kriteria teknis <p>(pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/peunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia) pengembangan BMKT</p>	Dokumen hasil evaluasi analisis pengembangan BMKT	0,71	<p>Dokumen evaluasi hasil analisis berupa konsep/draft kriteria teknis pengelolaan BMKT yang telah dilakukan FGD disertai kajian akademik/ naskah akademik pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/peunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/ modul/ ketentuan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis b. draft naskah akademik yang memuat: 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft kriteria teknis b. draft naskah akademik 	034	Ahli Madya	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait ketentuan teknis perikanan survei dan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					1. ruang lingkup belakang, permasalahan, maksud dan tujuan 2. latar belakang, maksud dan tujuan 3. pendekatan dan metodologi 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi muatan 7. penutup				peraturan perundang-undangan tentang perngangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
27.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. pengelompokan/ klasifikasi b. analisis deskriptif sesuai kebutuhan penyusunan draft naskah akademik, penyusunan draft kriteria teknis pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	0,52	Laporan hasil analisis, memuat: a. hasil pengelompokan/ resume materi penyusunan b. hasil analisis deskriptif sesuai kebutuhan	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	035	Ahli Muda	a. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota b. Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan d. Keputusan Menteri terkait ketentuan teknis penilaian survei dan penilaian perngangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
28.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi referensi b. merangkum sebagai bahan kajian draft	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan	0,34	Laporan hasil identifikasi memuat: a. hasil inventarisasi referensi, mencakup data kualitatif, data kuantitatif,	Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi	036	Ahli Pertama	a. Peraturan Pemerintah terkait urusan pemerintahan urusan pemerintahan daerah provinsi, dan daerah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
29.	Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	<p>akademik/naskah akademik dan draft kriteria teknis</p> <p>(pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pertunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia)/ modul pengelolaan BMKT</p>	BMKT	0,91	<p>tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan sesuai kebutuhan penyusunan draft kriteria teknis</p> <p>b. resume referensi</p>	<p>Hard copy/ soft copy</p> <p>a. kriteria teknis</p> <p>b. naskah akademik</p>	037	Ahli Utama	<p>provinsi, dan peme rintahan daerah kabupat en/kota</p> <p>b. Peraturan Peme rintah terkait Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait ketentuan teknis perizinan survei dan perizinan penguangan benda bergerak asal muatan kapal yang tenggelam</p>
		<p>Kriteria teknis pengelolaan sumber daya non konvensional, antara lain: mineral laut, OTEC, energi pasang surut, energi gelombang, energi mikro alga</p> <p>a. perencanaan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework)</p> <p>b. PGD</p> <p>c. konsultasi publik</p> <p>d. finalisasi dokumen berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pertunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/ modul dan kajian akademik/naskah akademik</p>	Dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	0,91	<p>Dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya non konvensional berupa pedoman umum/pedoman teknis/Standar Nasional Indonesia/modul yang telah dilakukan konsultasi publik disertai kajian akademik/naskah akademik yang terdiri dari:</p> <p>a. dokumen kriteria teknis yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis <p>b. naskah akademik yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang lingkup 	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Peme rintah terkait pem bagian urusan pemerintahan, antara peme rintah daerah provinsi, dan peme rintah daerah kabupat en/kota</p> <p>c. Peraturan Peme rintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>			

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
30.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan: a. perumusan Rancangan b. FGD c. penyusunan draft kajian akademik/ d. penyusunan draft kriteria teknis pedoman umum/pedoman teknis/ pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional/ modul pengalasan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	0,75	2. latar belakang, maksud dan tujuan 3. pendekatan dan metodologi 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi muatan 7. penutup Dokumen evaluasi hasil analisis berupa konsep/ draft kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional yang telah dibuktikan FGD disertai kajian akademik/ naskah akademik berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/ modul/ketentuan teknis yang memuat: a. draft kriteria teknis yang memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketentuan teknis b. draft naskah akademik yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, maksud dan tujuan 3. pendekatan dan metodologi 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi	Hard copy/ soft copy a. draft kriteria teknis b. draft naskah akademik	038	Ahli Matya	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan perkotaan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha risiko sektor kelurahan dan perkotaan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
31.	Melakukan analisis bahan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. pengelompokan/klasifikasi b. analisis deskriptif sesuai kebutuhan penyusunan draft naskah akademik, teknis penyusunan draft kriteria teknis umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/Standar Nasional sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	0,61	7. penutupan Laporan hasil analisis, memuat: a. hasil pengelompokan/resume materi penyusunan hasil analisis deskriptif sesuai kebutuhan	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	039	Ahli Muda	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha
32.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi referensi bahan kajian draft akademik/naskah akademik dan draft kriteria teknis umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul pengelompokan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	0,21	Laporan hasil identifikasi referensi, mencakup data kualitatif, data kuantitatif, tabulasi data, grafik, tabel, data penutupan sesuai kebutuhan penyusunan draft kriteria teknis resume referensi	Hard copy/soft copy laporan identifikasi	040	Ahli Pertama	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
33.	Melakukan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	Kriteria teknis pemanfaatan pasir laut yang meliputi: a. lokasi, volume, waktu, dan metode) b. pengangkutan, pemanfaatan, pengendalian dampak lingkungan dan sosial ekonomi c. monitoring evaluasi pengusahaan pasir laut mencakup: 1. perencanaan kerangka konsep kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework) 2. PGD 3. konsultasi publik 4. finalisasi dokumen umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pertunjuk teknis/ Standar Nasional Indonesia/modul kajian akademik/naskah akademik	Dokumen kriteria teknis pengusahaan pasir laut	1,00	Dokumen kriteria teknis pengusahaan pasir laut berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pertunjuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul yang telah dilakukan konsultasi publik diseleksi kajian akademik/naskah akademik yang terdiri dari: a. dokumen kriteria teknis yang memuat: 1. ruang lingkup 2. dasar hukum 3. istilah dan definisi 4. ketentuan umum 5. ketuntasan teknis b. naskah akademik yang memuat: 1. ruang lingkup belakang, permasalahan, maksud dan tujuan 3. pendekatan dan metodologi 4. kajian teoritis 5. landasan kajian 6. ruang lingkup materi muatan 7. penutup	Hard copy/ soft copy a. kriteria teknis b. naskah akademik	041	Abdi Utama	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penggunaan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
34.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan: a. perumusan rancangan b. PGD c. penyusunan draft kajian akademik/naskah akademik d. penyusunan draft kriteria teknis	Dokumen hasil analisis pengusahaan pasir laut	0,76	Dokumen evaluasi hasil analisis berupa konsep/draft kriteria teknis pengusahaan pasir laut yang telah dilakukan PGD disertai draft kajian akademik/naskah akademik berupa pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/	Hard copy/ soft copy a. draft kriteria teknis b. draft naskah akademik	042	Abdi Marha	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
35.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/pe tujuk teknis/Standar Nasional Indonesia/modul pemanfaatan pasir laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	0,52	<p>Laporan hasil analisis, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil pengelompokan/resume materi penyusunan hasil analisis deskriptif sesuai kebutuhan 	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	043	Abdi Mada	<p>provinsi, dan pemertahan daerah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
38.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	c. konsultasi publik, finalisasi rencana induk (master plan)/rancangan teknis (DED)	Dokumen hasil evaluasi analisis bahan penyusunan rancangan teknis bangunan laut dan instalasi laut	0,83	9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan rancangan teknis (DED) memuat: 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metode pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan a. Laporan evaluasi analisis bahan: draft rencana induk/master plan yang memuat: 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pengalihan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan (DED) yang memuat: 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metode pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan	Hard copy/soft copy laporan evaluasi berupa dilengkapi: a. draft rencana induk (master plan) b. draft rancangan teknis (DED)	046	Abdi Mulya	d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah dan pemerintahan kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
39.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	<p>pemeliharaan untuk draft rancangan teknis (DED)</p> <p>Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan pengelompokan/klasifikasi data pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut analisis berupa: <ol style="list-style-type: none"> analisis masing-masing aspek berupa aspek ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, penggunaan, kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan draft rencana induk (master plan). analisis berupa deskrib, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) 	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	0,65	Laporan hasil analisis berupa: <ol style="list-style-type: none"> hasil analisis untuk draft rencana induk/master plan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> aspek ekologis/fisik/hukum/sosial, dan budaya/pemanfaatan/pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana jangka waktu dan tahapan pelaksanaan hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan draft rancangan teknis (DED) 	Hardcopy/Softcopy laporan hasil analisis	047	Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang terkait petak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota Peraturan Menteri terkait pengelolaan produk perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
40.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	<p>Identifikasi bahan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan inventarisasi data dan referensi pengelolaan bangunan dan instalasi laut, serta 	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	0,33	Laporan hasil identifikasi berupa: <ol style="list-style-type: none"> data penyusunan draft master plan <ol style="list-style-type: none"> hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan 	Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi bahan	048	Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang terkait petak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
41.	Melakukan penyusunan rancangan teknis pengelobahan reklamasi	<p>c. merancang data berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data penjang meliputi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, pemantauan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan) 2. data analisis berupa: perhitungan desain, membuat gambar teknis, rab, sesuai kebutuhan draft rancangan teknis (DED) 	Dokumen rancangan teknis pengelobahan reklamasi	1,00	<p>budaya, pemantauan, pencegahan kerusakan ekologis dan mitigasi bencana, jangka waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan), penyusunan draft master plan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan 2. data penyusunan draft rancangan desain <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, rab sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan 	<p>Hard copy/soft copy berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana induk (master plan) b. rancangan teknis (DED) 	049	Ahli Utama	<p>perencanaan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan penkaban b. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor kelurahan dan perkaban
		<p>Rancangan teknis pengelolaan reklamasi, berupa: perencanaan (penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan reklamasi, penyusunan rancangan detail), pelaksanaan reklamasi, monitoring dan evaluasi, relokasi dan kompensasi kegiatan reklamasi, sumber material (kegiatan lokasi, jenis material, pengam bilan dan pengangkutan) pengeblan lahan hasil reklamasi mencahay:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerangka pikir/kerangka 	Dokumen rancangan teknis yang telah disetujui pimpinan unit kerja berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem 	<p>Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri terkait penanaman reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait petunjuk teknis maatan dokumen andal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil c. Peraturan Menteri terkait ketentuan terkait yang diterbitkan oleh direktur yang 					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>kerja (<i>logical frame work</i>)</p> <p>b. PGD konsultasi publik, finalisasi rencana induk (<i>master plan</i>)/rancangan teknis (DED)</p>			<p>dan mitigasi bencana jangka waktu dan tahapan pelaksanaan</p> <p>b. rancangan teknis (DED) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nota desain 2. gambar rancangan/ detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft rencana induk (<i>master plan</i>) b. draft rancangan teknis (DED) 	050	Abdi Madya	<p>Penetapan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Penetapan Menteri terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Penetapan Menteri terkait petunjuk teknis muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Keputusan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengendalian ruang laut</p>
42.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi	<p>Evaluasi hasil analisis bahan yang merujuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PGD koordinasi dan pembahasan b. PGD penyusunan draft rencana induk (<i>master plan</i>)/draft rancangan teknis terkait pengendalian reklamasi 	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan reklamasi	0,71	<p>Dokumen evaluasi analisis berupa draft rancangan teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft rencana induk/<i>master plan</i> yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana b. draft Rancangan Teknis (DED) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <p>Laporan hasil analisis</p>	051	Abdi Muda	<p>Penetapan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Keputusan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengendalian ruang laut</p>
43.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan	<p>Analisis hasil identifikasi bahan yang merujuk kegiatan pengumpulan/klasifikasi data</p>	Laporan analisis bahan penyusunan	0,48	<p>Laporan hasil analisis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil analisis untuk draft 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <p>Laporan hasil analisis</p>	051	Abdi Muda	<p>Penetapan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Keputusan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengendalian ruang laut</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	teknis pengelolaan reklamasi	<p>pengelolaan reklamasi, analisis berupa:</p> <p>a. analisis masing-masing aspek ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan draft rencana induk (master plan)</p> <p>b. analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED)</p>	rancangan teknis pengelolaan reklamasi		<p>rencana induk/ master plan berupa analisis aspek, yang memuat:</p> <p>1. aspek ekologis/fisik/hukum/ sosial/ ekonomi, dan budaya/ pemanfaatan/ pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana</p> <p>2. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan</p> <p>b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan rancangan teknis (DED)</p>				<p>pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penanaman reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait petunjuk teknis muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>d. Ketentuan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengusahaan ruang laut</p>
44.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi	<p>Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan inventarisasi data dan rekensi pengelolaan reklamasi serta merangkum data berupa:</p> <p>a. data penunjang meliputi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan)</p> <p>b. data analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar spesifikasi teknis, RAB, sesuai kebutuhan draft</p>	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis reklamasi	0,25	<p>Laporan identifikasi bahan berupa:</p> <p>a. data penyusunan draft master plan</p> <p>1. hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan), penyusunan draft master plan</p> <p>2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data</p>	Hard copy/soft copy laporan identifikasi bahan	052	Ahli Pertama	<p>a. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penanaman reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait petunjuk teknis muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>d. Ketentuan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengusahaan ruang laut</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
45.	Melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	Rancangan teknis pemanfaatan air laut, perencanaan (penentuan lokasi bahan baku), penyusunan rencana induk produk/pemanfaatan air laut, produk/ ekstraksi pemanfaatan air laut (antara lain desalinasi, air laut dalam (ALD), garam dan mineral lainnya), pemanfaatan air laut sebagai media / jasa antara lain coating water, perikanan budidaya, dan kegiatan lainnya), monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> kerangka pikir/ kerangka kerja (logical framework) FGD konsultasi publik, finalisasi rencana induk (master plan)/rancangan teknis (DED) 	Dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut	1,18	<p>peraturan penyusunan draft rancangan desain</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) penyajian data berupa tabel, data, grafik, tabel, data peraturan <p>Dokumen evaluasi analisis berupa draft rancangan teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> draft rencana induk/master plan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> pendahuluan kondisi umum aspek ekologis aspek fisik aspek hukum aspek sosial, ekonomi dan budaya aspek pemanfaatan aspek pencapaian kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana jangka waktu dan tahapan pelaksanaan draft rancangan teknis (DED) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> nota desain gambar rancangan/detail desain spesifikasi teknis metoda pelaksanaan rencana anggaran biaya dokumen operasi dan pemeliharaan 	<p>Hard copy/soft copy dokumen rancangan teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana induk (master plan) rancangan teknis (DED) 	053	Ahli Utama	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang terkait cipta kerja Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penanaman berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
46.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan: a. koordinasi dan pembahasan b. FGD c. penyusunan draft rencana induk (<i>master plan</i>)/draft rancangan teknis terkait pemanfaatan air laut yang menghasilkan produk antara lain: desalinasi, garam, dan mineral lainnya) dan air laut untuk pelayanan antara lain: cooling water dan perikanan budidaya yang mencakup: 1. evaluasi keseluruhan aspek ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (<i>master plan</i>), penyusunan draft <i>master plan</i> 2. evaluasi hitungan desain, gambar desain, RAB, menentukan spesifikasi teknis, menyusun dokumen operasi dan pemeliharaan untuk penyusunan draft rancangan teknis (DED)	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	0,77	Dokumen evaluasi analisis berupa draft rancangan teknis berupa: a. draft rencana induk/ <i>master plan</i> yang memuat: 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan b. draft rancangan teknis (DED) yang memuat: 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan	Hard copy/ soft copy a. draft rencana induk (<i>master plan</i>) b. draft rancangan teknis (DED)	054	Ahli Muda	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
47.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan pengelompokan/klasifikasi data penyusunan rancangan	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan pengelompokan/klasifikasi data	Laporan analisis bahan penyusunan	0,52	Laporan hasil analisis berupa: a. hasil analisis untuk draft rencana induk/ <i>master plan</i>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	055	Ahli Muda	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	teknis pemanfaatan air laut	<p>pengelompokan bangunan laut dan instalasi laut, analisis berupa:</p> <p>a. analisis masing-masing aspek ekologis, fiskal, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan draft rencana induk (<i>master plan</i>)</p> <p>b. analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan draft penyusunan draft rancangan teknis (DED)</p>	<p>rancangan teknis pemanfaatan air laut</p>	0,21	<p>yang memuat:</p> <p>1. aspek ekologis/fiskal/hukum/sosial, ekonomi, dan budaya/pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana</p> <p>2. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan</p> <p>b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung rab, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan draft penyusunan rancangan teknis (DED)</p>	<p>Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi bahan</p>	056	<p>terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>	
48.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	<p>Identifikasi bahan yang mencakup inventarisasi data dan referensi pemanfaatan air laut serta merangkum data berupa:</p> <p>a. data penunjang meliputi data ekologis, fiskal, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (<i>master plan</i>)</p> <p>b. data analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar menghitung RAB, spesifikasi teknis, sesuai kebutuhan draft</p>	<p>Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan air laut</p>	0,21	<p>Laporan identifikasi bahan berupa:</p> <p>a. data penyusunan draft master plan</p> <p>1. hasil inventarisasi data ekologis, fiskal, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (<i>master plan</i>), penyusunan draft master plan</p> <p>2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan</p>	<p>Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi bahan</p>	056	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
49.	Melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut sebagai bioteknologi laut	<p>mancangan teknis (DED)</p> <p>a. Rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi laut dan bioteknologi laut sebagai bioteknologi laut sebagai bahan baku, produk/ekstraksi pemanfaatan sumber daya biota laut, dan perencanaan (penentuan lokasi dan penyusunan rencana induk) teknologi pemanfaatan sumber daya biota laut), pembiayaan, investasi, dan monitoring dan evaluasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logic framework</i>) FGD konsultasi publik, finalisasi rencana induk (<i>muster plan</i>)/mancangan teknis (DED) 	Dokumen rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	1,18	<p>b. data penyusunan draft rancangan desain</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) penyajian data berupa tabel, data, grafik, dan data peraturuan 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana induk (<i>muster plan</i>) mancangan teknis (DED) 	057	Ahli Utama	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, kabupaten/kota</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait bidang kelayakan dan perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
50.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan: a. koordinasi dan pembahasan b. FGD c. penyusunan draft rencana induk (<i>master plan</i>)/draft rancangan teknis terkait pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut yang berupa: 1. evaluasi keseluruhan aspek meliputi spek ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (<i>master plan</i>), penyusunan draft master plan, evaluasi hitungan desain, gambar desain, RAB, menentukan spesifikasi teknis, menyusun dokumen operasi dan pemeliharaan untuk penyusunan draft rancangan teknis (DED)	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	0,93	Dokumen evaluasi analisis berupa Draft rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut berupa: a. draft rencana induk/ <i>master plan</i> yang memuat: 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi dan budaya 7. aspek pemanfaatan pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan b. draft rancangan teknis (DED) yang memuat: 1. nota desain 2. gambar 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasional dan pemeliharaan	Hard copy/ soft copy a. draft rencana induk (<i>master plan</i>) b. draft rancangan teknis (DED)	058	Ahli Madya	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait bidang perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
51.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan pengelompokan/ klasifikasi data pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut, analisis berupa: a. analisis masing-masing aspek	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	0,48	Laporan hasil analisis berupa: a. hasil analisis untuk draft rencana induk/ <i>master plan</i> yang memuat: 1. aspek ekologis/fisik/hukum/ sosial, ekonomi dan budaya/	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	059	Ahli Madya	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan draft rencana induk (<i>master plan</i>).</p> <p>b. analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan rancangan teknis (DED).</p>			<p>1. pemantauan/pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana</p> <p>2. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan</p> <p>b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan draft penyusunan rancangan teknis (DED)</p>	<p>Hard copy/ soft copy Laporan hasil identifikasi bahan</p>	060	Ahli Pertama	<p>c. Peraturan Menteri terkait bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
52.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	<p>Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan rekayasa pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut berupa:</p> <p>a. Data panjang meliputi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (<i>master plan</i>)</p> <p>b. data analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, RAB, sesuai kebutuhan draft rancangan teknis (DED).</p>	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	0,23	<p>Identifikasi bahan berupa:</p> <p>a. data penyusunan draft <i>master plan</i> yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (<i>master plan</i>), penyusunan draft <i>master plan</i> 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan <p>b. data penyusunan draft rancangan desain yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil inventarisasi 		060	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait uraian pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
53.	Melakukan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	Rancangan teknis pengelolaan wisata bahari berupa kolom laut/dasar laut, lintara lain menyelam (<i>diving</i>), snorkeling, coral reef viewing, pengamatan biota bawah laut, berenang laut lintara lain : berenang (<i>swimming</i>), memancing (<i>fishing</i>), mendayung (<i>boating</i>), berlayar (<i>sailing</i>), kayaking, selancar (<i>surfing</i>), parasailing, <i>sea cruising</i>), dan pengamatan biota, wisata pesisir/pantai, lintara lain wisata mangrove, voli pantai, berjemur laut (<i>bathting</i>), sepeda pantai) yang <i>feasible</i> dan berkelanjutan mencakup: a. kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>) b. FGD c. konsultasi publik dan finalisasi rencana induk (<i>master plan</i>)/rancangan teknis (DED)	Dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	1,15	berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan a. dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari yang memuat: 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi, dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan b. rancangan teknis (DED) yang memuat: 1. foto desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya	Hard copy/soft copy berupa: a. rencana induk (<i>master plan</i>)/ rancangan teknis (DED)	061	Ahli Utama	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Menteri terkait pengembangan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan penkaban negara Republik Indonesia yang bukan tujuan komersial c. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan e. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pematiran
54.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan koordinasi dan pembahasan, diskusi terfokus/FGD serta penyusunan draft rencana induk (<i>master plan</i>)/draft rancangan teknis terkait	Dokumen hasil analisis evaluasi rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	0,82	Dokumen evaluasi analisis berupa draft rancangan teknis pengelolaan wisata bahari berupa: a. draft rencana induk/ <i>master plan</i> yang memuat:	Hard copy/soft copy berupa: a. draft rencana induk (<i>master plan</i>) b. draft rancangan	062	Ahli Madya	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Menteri terkait pengembangan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>perencanaan wisata bahari berupa:</p> <p>a. evaluasi keseluruhan aspek meliputi aspek ekologi, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu, dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan) untuk penyusunan draft master plan</p> <p>b. evaluasi hitungan desain, gambar desain, RAB, menentukan spesifikasi teknis, menyusun dokumen operasi, dan pemeliharaan untuk penyusunan draft rancangan teknis (DED)</p>	laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengalihan wisata bahari	0,45	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi, dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan <p>b. draft rancangan teknis (DED) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nota desain 2. gambar 3. rancangan/detail desain 4. spesifikasi teknis 5. metoda pelaksanaan 6. rencana anggaran biaya 7. dokumen operasi dan pemeliharaan 	teknis (DED)	063	Ahli Muda	<p>perencanaan wisata bahari</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait desa</p> <p>d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi permaran untuk pariwisata alam permaran</p>
55.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	<p>analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan pengelompokan/ klasifikasi data analisis berupa:</p> <p>a. analisis masing-masing aspek berupa aspek ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu, dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan draft rencana induk (master plan).</p> <p>b. analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar</p>	laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengalihan wisata bahari	0,45	<p>laporan hasil analisis berupa:</p> <p>a. hasil analisis untuk draft rencana induk/ master plan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aspek ekologis/fisik/hukum /sosial, ekonomi, dan budaya/ pemanfaatan /pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 2. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan <p>b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen</p>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	063	Ahli Muda	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penanggulangan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang bukan tujuan komersial</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari</p> <p>d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
56.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen operasi, dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan rancangan teknis (DED)	identifikasi bahan yang mencakup kegiatan inventarisasi data dan referensi pergelanaan wisata bahari, serta merangkum data berupa: a. data penunjang meliputi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, perencanaan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan draft rencana induk (master plan)	0,32	laporan identifikasi bahan berupa: a. data penyusunan draft master plan yang memuat: 1. hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, perencanaan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan), dan penyusunan draft master plan 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan b. data penyusunan draft rancangan desain yang memuat: 1. hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data perturnan	Laporan identifikasi bahan	064	Ahli Pertama	c. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam pematang a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Menteri terkait pengangkatan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang bukan tujuan komersial c. Peraturan Menteri terkait terkait desa wisata bahari d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan e. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam pematang
57.	Melakukan penyusunan rancangan teknis	Rancangan teknis pengelolaan pergelanaan BMKT, berupa	Dokumen rancangan teknis	1,00	Dokumen rancangan teknis	Hard copy/ soft copy	065	Ahli Utama	a. Peraturan terkait pematang pembagian

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pengelolaan BMKT	perencanaan, pelaksanaan, yang meliputi rencana pengambilan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia/personal, manajemen risiko yang disesuaikan dengan kondisi lokasi pengangkutan, penanganan di atas kapal dan rehabilitasi ekosistem pada lokasi pengangkutan, pendayagunaan BMKT yang meliputi BMKT yang ton BMN seperti pemanfaatan mutu untuk wisata/konservasi dan BMKT yang berstatus BMN yaitu pemanfaatan antara lain melalui hibah dan/atau pemindahannya BMKT, seperti tukar memutar, monitoring, dan evaluasi yang mencakup:	pengelolaan BMKT		<p>pengelolaan BMKT berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana induk/ master plan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> pendahuluan kondisi umum aspek ekologis aspek fisik aspek hukum aspek sosial, ekonomi, dan budaya aspek pemanfaatan aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana jangka waktu dan tahapan pelaksanaan rencanaan teknis (DED) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> nota desah gambar rencangan/detail desain spesifikasi teknis metoda pelaksanaan rencana anggaran biaya 	<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana induk (master plan) rencangan teknis (DED) 			<p>urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Perintah terkait penyelesaian dan bidang kelautan dan perikanan Penetapan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian perusahaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Keputusan Menteri terkait perizinan survei dan perizinan pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
58.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan koordinasi dan pembahasan, diskusi terfokus/FGD serta penyusunan draft rencana induk (Master Plan) draft rancangan teknis terkait pengelolaan BMKT berupa:	Dokumen hasil analisis evaluasi rancangan teknis pengelolaan BMKT	0,80	<p>Dokumen evaluasi analisis berupa draft rancangan teknis pengelolaan BMKT berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> draft rencana induk/ master plan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> pendahuluan kondisi umum aspek ekologis aspek fisik aspek hukum aspek sosial, ekonomi, dan budaya aspek pemanfaatan aspek pencegahan 	<p>Hard copy/soft copy berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> draft rencana induk (master plan) draft rancangan teknis (DED) 	066	Abdi Mulya	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Perintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota Penetapan Perintah terkait penyelesaian dan bidang kelautan dan perikanan Penetapan Menteri terkait standar kegiatan usaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
59.	Melakukan analisis bahan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	mitigasi bencana, jangka waktu, dan tahapan pelaksanaan draft rencana induk (master plan) untuk penyusunan draft master plan b. evaluasi hitungan desain, RAB, menentukan spesifikasi teknis, menyusun dokumen operasi, dan pemeliharaan untuk penyusunan draft rancangan teknis (DED)	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	0,45	<p>kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana</p> <p>9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan tabapan pelaksanaan teknis (DED) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan <p>Laporan hasil analisis berupa:</p> <p>a. hasil analisis untuk draft rencana induk/ master plan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aspek ekologis/fisik/hukum/sosial, ekonomi, dan budaya/pekerjaan/p erubahan ekosistem dan mitigasi bencana 2. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan <p>b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan draft rancangan teknis (DED)</p>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	067	Ahli Muda	<p>dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait perizinan survei dan perizinan pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam</p> <p>a. Peraturan Menteri terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait perizinan survei dan perizinan pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam</p>
60.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan	identifikasi bahan kegiatan yang	Laporan identifikasi	0,35	Laporan identifikasi bahan	Hard copy/soft copy hasil laporan	068	Ahli Pertama	a. Peraturan Menteri terkait pembagian

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	mencakup perencanaan teknis pengelolaan BMKT	inventarisasi data dan referensi pengelolaan BMKT, serta merangkum data berupa: a. data penunjang meliputi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu, dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan) b. data analisis berupa perhitungan gambar desain, spesifikasi teknis, RAB, sesuai kebutuhan draft rancangan teknis (DED)	bahan rancangan teknis pengelolaan BMKT		berupa: a. data penyusunan draft master plan yang memuat: 1. hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan), dan penyusunan draft master plan 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, data peraturan b. data penyusunan draft rancangan desain yang memuat: 1. hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, dan RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan	identifikasi bahan			urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan d. Keputusan Menteri terkait perizinan survei dan perizinan pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
61.	Melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional energi pasang surut, energi angin, energi arus laut, energi gelombang, energi mikro alga yang mencakup: a. kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework)	Rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional antara lain mineral laut, OTEC, energi pasang surut, energi angin, energi arus laut, energi gelombang, energi mikro alga yang mencakup: a. kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework)	Dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	1,18	Dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional berupa: a. rencana induk/master plan yang memuat: 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik	Hard copy/soft copy berupa: a. rencana induk (master plan) b. rancangan teknis (DED)	069	Abdi Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
62.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengalokasian sumber daya non konvensional	<p>b. FGD</p> <p>c. konsultasi publik dan finalisasi rencana induk (master plan)/rancangan teknis (DED)</p>	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya non konvensional	0,82	<p>5. aspek hukum dan budaya</p> <p>6. aspek sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>7. aspek pemanfaatan sumber daya non konvensional</p> <p>8. aspek pengalokasian sumber daya non konvensional</p> <p>9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan rancangan teknis (DED) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft rencana induk (master plan) b. draft rancangan teknis (DED) 	070	Abdi Madya	<p>provinsi, dan pemerintah daerah kabupatere/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan pertamanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelurahan dan pertamanan</p>
	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengalokasian sumber daya non konvensional	<p>Evaluasi hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan koordinasi dan pembahasan, diskusi terfokus/FGD serta penyusunan draft rencana induk (master plan)/draft rancangan teknis terkait pengalokasian sumber daya non konvensional berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi keseluruhan aspek meliputi aspek ekologi, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pelestarian kerusaklan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan) untuk penyusunan draft master plan b. evaluasi hitungan desain, gambar desain, JAB, menentukan spesifikasi 	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya non konvensional	0,82	<p>Dokumen evaluasi analisis berupa draft rancangan teknis pengalokasian sumber daya non konvensional berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft rencana induk/master plan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi, dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek perencanaan ekosistem dan mitigasi bencana dan tahapan pelaksanaan b. draft rancangan teknis (DED) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 	<p>Hard copy/ soft copy</p> <ol style="list-style-type: none"> a. draft rencana induk (master plan) b. draft rancangan teknis (DED) 	070	Abdi Madya	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupatere/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan pertamanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelurahan dan pertamanan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
63.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	<p>teknis, menyusun dokumen operasi, dan pemeliharaan untuk penyusunan draft rancangan teknis (DED)</p> <p>Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan penge-lompokan/klasifikasi data sumber daya non konvensional berupa:</p> <p>a. analisis masing-masing aspek berupa aspek ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan draft rencana induk (master plan)</p> <p>b. analisis berupa perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung rab, dokumen operasi, dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED)</p>	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	0,46	<p>4. metode pelaksanaan</p> <p>5. rencana anggaran biaya</p> <p>6. dokumen operasi dan pemeliharaan</p> <p>Laporan hasil analisis berupa:</p> <p>a. hasil analisis untuk draft rencana induk/ master plan yang memuat:</p> <p>1. aspek ekologis/fisik/hukum/sosial, ekonomi, dan budaya/pemanfaatan/pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana</p> <p>2. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan</p> <p>b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) yang memuat perhitungan desain, membuat gambar desain, spesifikasi teknis, menghitung RAB, dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan rancangan teknis (DED)</p>	Hard copy/ soft copy laporan hasil analisis	071	Ahli Muda	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait bidang penganggaran dan penanaman</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelurahan dan perkotaan</p>
64.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	<p>Identifikasi bahan kegiatan inventarisasi data dan referensi sumber daya non konvensional serta merangkum data berupa:</p> <p>a. data penunjang meliputi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu, dan tahapan</p>	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	0,28	<p>Laporan Identifikasi bahan berupa:</p> <p>a. data penyusunan draft master plan yang memuat:</p> <p>1. hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemanfaatan, pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu, dan tahapan</p>	Hard copy/soft copy hasil identifikasi bahan	072	Ahli Pertama	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penganggaran dan bidang kelurahan dan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan) dan analisis biaya perhitungan gambar desain, spesifikasi teknis, RAB, sesuai kebutuhan draft nancangan teknis (DED)</p>			<p>pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (master plan) dan penyusunan draft master plan. 2. penyajian data berupa tabel, data, grafik, data dan data peraturannya b. data penyusunan draft nancangan desain yang memuat: 1. hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft nancangan teknis (DED) 2. penyajian data berupa tabel, data, grafik, data dan data peraturannya</p>			<p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>	
65.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	<p>Studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan dan instalasi laut mencakup: a. penyusunan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework) b. FGD c. finalisasi dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, sesuai fungsi: 1. perikanan 2. perikanan 3. wisata bahari 4. pelayaran 5. perhubungan dalam 6. telekomunikasi</p>	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	1,00	<p>Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut yang memuat: a. FGD b. dokumen studi kelayakan teknis, sekurang-kurangnya yang mencakup: 1. rencana kegiatan, gambaran umum, metode, dan rencana kerja 2. tujuan umum 3. kajian kebutuhan dan pembiayaan 4. kajian kelayakan lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan operasional</p>	<p>Hard copy/ Soft copy berupa dokumen studi kelayakan teknis</p>	073	Ahli Utama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		7. kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 8. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara 9. instalasi 10. penyediaan sumber daya air 11. pemanfaatan air laut selain energi			5. lay out rencana kegiatan 6. desain dasar (basic design)				perincian berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
66.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi wilayah studi, kebutuhan, permintaan, dan kondisi eksisting b. membuat draft rencana kegiatan dan menyusun draft desain dasar	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi wilayah studi, kebutuhan, permintaan, dan kondisi eksisting b. membuat draft rencana kegiatan dan menyusun draft desain dasar	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis pembangunan laut dan instalasi laut	0,80	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis pembangunan laut dan instalasi laut berupa draft dokumen studi kelayakan teknis sekurang-kurangnya terdiri dari: a. rencana kegiatan, ringkasan gambaran umum, metode, dan rencana kerja b. tinjauan umum c. kajian teknis kebutuhan dan permintaan d. indikasi kelayakan, antara lain lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, operasional e. draft lay out rencana kegiatan f. draft desain dasar (basic design)	Hard copy/ Soft copy draft dan dokumen studi kelayakan teknis	074	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah/kota kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Bidang Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
67.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pembangunan bangunan laut dan instalasi laut	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup: a. menyusun kebutuhan dan metode inventarisasi data yang diperlukan b. pengelompokan/klasifikasi data sesuai kebutuhan	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pembangunan laut dan instalasi laut	0,58	Laporan hasil analisis berupa: a. analisis terhadap tata ruang wilayah studi b. analisis permintaan dan kebutuhan c. analisis kondisi eksisting d. analisis data untuk kebutuhan desain dasar	Hard copy/ soft copy laporan hasil analisis	075	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR (basic design)	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
68.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	<p>e. analisis bahan</p> <p>Mengidentifikasi bahan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi data umum dan data teknis, kualitatif dan kuantitatif sebagai bahan yang relevan dan perlu diacu dalam penyusunan studi teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuesioner memilah, merangkum, serta menyajikan data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturannya menyusun laporan 	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	0,32	<p>Laporan Identifikasi bahan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> urutan kegiatan pe laksanaan kegiatan hasil inventarisasi data antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> data batimetri, topografi, arus, angin, gelombang, pasang surut, hidrometri, hidrologi, mekanika tanah/geoteknik, dan georologi, data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, teluk, delta, gurunak pasir, panta, dan/atau populasi ikan) data sosial, ekonomi, dan budaya data pemanfaatan ruang laut yang telah ada 	Hard copy/soft copy Laporan Identifikasi bahan	076	Ahli Pertama	<p>pemerintahan daerah provinsi, daerah dan kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Penetapan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>5. data risiko bencana dan karakteristik fisika dan kimia laut dan udara)</p> <p>6. data kondisi biologi (flora, fauna, dan manusia)</p> <p>7. data kondisi biologi (flora, fauna, dan manusia)</p> <p>8. dokumen perencanaan pemanfaatan perairan pesisir</p> <p>d. penyajian data berupa tabel, grafik, tabel, dan data peraturan</p>				
69.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	<p>studi kelayakan teknis reklamasi yang mencakup:</p> <p>a. penyusunan konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>)</p> <p>b. FGD</p> <p>c. finalisasi dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi yang memuat justifikasi teknis terhadap kelayakan pengelolaan reklamasi berupa penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan reklamasi, dan penyusunan rancangan detail</p>	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	1,00	<p>dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi yang telah disetujui pimpinan unit kerja memuat:</p> <p>a. rencana kegiatan</p> <p>b. ringkasan gambaran umum, metode, dan rencana kerja</p> <p>c. tinjauan umum meliputi tinjauan fisik, lokasi, perubahan pola arus, dan sedimentasi atau tinjauan dari aspek hidrolik dan geoteknik</p> <p>d. strategi pelaksanaan</p> <p>e. indikasi kelayakan antara lain lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta operasional</p> <p>f. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan</p>	Hard copy/soft copy berupa dokumen Studi Kelayakan Teknis	077	Ahli Utama	<p>a. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait Petunjuk Teknis Muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>d. Keputusan yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut</p>
70.	Melakukan evaluasi bahan hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	<p>Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis yang mencakup kegiatan:</p> <p>a. melakukan evaluasi wilayah studi, kebutuhan, dan kondisi permintaan, dan kondisi</p>	Dokumen hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	0,78	<p>Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi laut dan instalasi laut berupa draft dokumen studi kelayakan teknis yang sekurang -</p>	Hard copy/Soft copy draft dokumen studi kelayakan teknis	078	Ahli Madya	<p>a. Peraturan Presiden terkait Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		e.kesiting b.membuat draft rencana kegiatan c.menyusun draft desain dasar			kinungnya terdiri dari: a. rencana kegiatan b. ringkasan gambaran umum, metode, dan rencana kerja c. tinjauan umum meliputi tinjauan fisik, lokasi, perubahan pola arus dan sedimentasi atau tinjauan dari aspek hidromik dan geoteknik d. strategi pelaksanaan e. indikasi kelayakan antara lain lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta operasional dan pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan				c. Peraturan Menteri terkait Petunjuk Teknis Muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Peraturan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengeloaan ruang laut
71.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup: a. menyusun kebutuhan dan metode inventarisasi data yang diperlukan b. pengelompokan/klasifikasi data sesuai kebutuhan c. analisis bahan	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	0,56	Laporan hasil analisis berupa: a. analisis terhadap tata ruang wilayah studi b. analisis permintaan dan kebutuhan c. analisis kondisi eksisting d. analisis data untuk kebutuhan desain dasar (basic design)	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	079	Abdi Mulya	a. Peraturan Presiden terkait Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait penziban reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil c. Ketentuan terkait petunjuk teknis muatan dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Ketentuan yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengeloaan ruang laut
72.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi	Identifikasi bahan yang mencakup: a. bahan yang	Laporan identifikasi bahan studi	0,36	Laporan Identifikasi bahan yang memuat:	Hard copy/soft copy hasil laporan	080	Abdi Pertama	a. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	<p>a. inventarisasi data umum dan data teknis, kualitatif dan kuantitatif sebagai bahan yang relevan dan perlu diacu dalam penyusunan studi kelayakan pengelolaan reklamasi</p> <p>b. survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuisioner</p> <p>c. memilah, merangkum, dan menyajikan data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peratuman</p> <p>d. menyusun laporan</p>	kelayakan teknis pengelolaan reklamasi		<p>a. hasil inventarisasi data antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data batimetri, topografi, arus, angin, gelombang, pasang surut, hidrometri, hidrologi, mekanika tanah/geoteknik, dan geomorfologi geologi laut 2. data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, teluk, delta, gunduk pasir, pantai, dan/atau populasi ikan) 3. data sosial, ekonomi, dan budaya 4. data pemahaman ruang laut yang telah ada 5. data risiko bencana 6. data karakteristik fisika dan kimia air dan udara) 7. data kondisi biologi (flora, fauna, dan mamalia) 8. dokumen perencanaan pemanfaatan perairan pesisir <p>b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peratuman</p>	Identifikasi bahan			<p>b. Peraturan Menteri terkait penataan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Teknik Mutaun dokumen amdal untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>d. Ketentuan terkait yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut</p>
73.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	<p>Studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut yang mengasah produk (antara lain desalinasi, air laut dalam, garam, dan mineral lainnya) dan air laut untuk pelepasan/bahan pendukung (antara lain cooling water, perlakuan budidaya, dan</p>	Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	1,18	<p>Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana kegiatan b. gambaran umum, metode, rencana kerja c. tinjauan umum 	Hard copy/soft copy berupa Dokumen Studi Kelayakan Teknis	081	Abdi Utama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
74.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	kegiatan lain) yang mencakup: a. penyusunan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework) b. FGD c. finalisasi dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	1,00	d. kajian kebutuhan dan permintaan e. kajian kelayakan kapasitas produksi, metode pengembalian/pemanfaatan, metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana, bahan baku dan pendukung, teknologi, dan biaya produksi g. lay out h. desain dasar (basic design) i. operasionalisasi dan pemeliharaan dan pengemasan dan pengendalian kesimpulan dan rekomendasi	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan teknis	082	Abli Madya	perintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi wilayah studi, kebutuhan, dan kondisi permintaan, dan kondisi eksisting b. membuat draft rencana kegiatan c. menyusun draft desain dasar	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	1,00	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut berupa draft dokumen studi kelayakan teknis yang memuat: a. rencana kegiatan b. ringkasan gambaran umum, metode, dan rencana kerja c. tinjauan umum d. kajian teknis kebutuhan dan permintaan e. indikasi kelayakan antara lain lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta operasional draft lay out rencana kegiatan g. draft desain dasar (basic design)	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan teknis	082	Abli Madya	a. Undang-undang terkait kerja b. Peraturan Menteri terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan berbasis risiko e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
75.	Melakukan analisis bahan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup: a. menyusun kebutuhan dan metode inventarisasi data yang diperlukan b. pengelompokan/klasifikasi data sesuai kebutuhan c. analisis bahan	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan pemanfaatan air laut	0,53	Laporan hasil analisis berupa: a. analisis terbadag tata ruang wilayah studi kelayakan b. analisis pemanfaatan dan kebutuhan c. analisis kondisi keisting d. analisis data untuk kebutuhan desain dasar (basic design)	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	083	Ahli Muda	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah tentang penyerenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan berbasis risiko e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
76.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Identifikasi bahan yang mencakup: a. inventarisasi data umum dan data teknis, kualitatif dan kuantitatif, antara lain berupa data: 1. hidroseranografi 2. ekosistem perairan 3. sosial ekonomi 4. pemanfaatan eksisting perairan 5. prasarana dan sarana, bahan baku, pendukung, teknologi,	Laporan identifikasi bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	0,25	Laporan Identifikasi bahan memuat: a. hasil inventarisasi data antara lain berupa: 1. letak geografis 2. kondisi hidroseranografi perairan 3. kondisi ekosistem 4. kondisi sosial ekonomi 5. pemanfaatan eksisting perairan 6. kapasitas produksi 7. metode	Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi bahan	084	Ahli Pertama	a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>dan biaya produksi)</p> <p>b. survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuisioner</p> <p>c. memilah, merangkum, serta menyajikan data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan</p> <p>d. menyusun laporan</p>			<p>pengambilan/pemanfaatan</p> <p>8. metode pengopearasian</p> <p>9. metode perawatan dan perbaikan instalasi</p> <p>10. prasarana dan sarana, bahan baku, penstokan, teknologi, dan biaya produksi</p> <p>b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, table, <i>flowchart</i>, dan data peraturan</p>				<p>d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
77.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan pemanfaatan teknologi bioteknologi dan bioteknologi laut	<p>Studi kelayakan pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut untuk farmasetika, kosmetika, dan nutrasetika antara lain berupa bahan baku, produksi pengeimbangan, pengembangan produk, dan komersialisasi yang mencakup:</p> <p>a. penyusunan kerangka konsep, kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>)</p> <p>b. koordinasi dan FGD</p> <p>c. finalisasi dokumen studi kelayakan pengelolaan bioteknologi dan bioteknologi laut</p>	Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan teknologi bioteknologi laut dan bioteknologi laut	1,18	<p>Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi laut yang memuat:</p> <p>a. hasil koordinasi/FGD</p> <p>b. rencana kegiatan</p> <p>c. gambaran umum, metode, dan rencana kerja</p> <p>d. tujuan umum</p> <p>e. kajian kebutuhan dan permintaan</p> <p>f. kajian kelayakan</p> <p>g. kapasitas produksi, metode pengangkutan/pemanfaatan, metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana, bahan baku, pendukung, teknologi, dan biaya produksi</p> <p>h. <i>lay out</i> rencana kegiatan</p> <p>i. desain dasar (<i>basic design</i>)</p> <p>j. kesimpulan dan rekomendasi</p>	<p>Hard copy/soft copy berupa dokumen kelayakan teknis</p>	085	<p>Ahli Utama</p>	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
78.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis yang	Dokumen hasil evaluasi	1,03	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan	Hard copy/soft copy draft dokumen studi	086	<p>Ahli Madya</p>	<p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
80.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	Identifikasi bahan yang mencakup: a. inventarisasi data umum, data teknis, kualitatif, dan kuantitatif antara lain berupa: 1. hidroese-anografi 2. ekosistem perairan 3. sosial ekonomi 4. pemanfaatan eksisting perairan 5. prasarana dan sarana, baku, pendukung, teknologi, dan biaya produksi b. survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuesioner c. memilah, merangkum, serta menyajikan data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan d. menyusun laporan	Laporan identifikasi bahan kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	0,29	Laporan identifikasi bahan memuat: a. hasil inventarisasi data antara lain berupa: 1.etak geografis 2. kondisi hidroese-anografi 3. kondisi ekosistem perairan 4. kondisi sosial ekonomi 5. pemanfaatan eksisting perairan 6. kapasitas produksi 7. metode pengambilan/pemanfaatan 8. metode pengoperasian 9. metode perawatan dan perbaikan instalasi 10. prasarana dan sarana, bahan baku, pendukung, teknologi, dan biaya produksi b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan	Hard copy/soft copy laporan identifikasi bahan	089	Ahli Utama	dan produk pada penyelenggaraan perusahaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
81.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari pada bentuk wahah/dasar laut antara lain menyelam (diving), snorkeling, coral reef viewing, berenang laut antara lain memancing (spearfishing), berenang memancing (freediving), berlayar (sailing), kayaking, selancar (surfing), parasailing, aca	Dokumen studi kelayakan teknis pengembangan wisata bahari	1,18	Dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari memuat: a. hasil koordinasi/FGD b. rencana kegiatan dan rencana kerja dan tinjauan umum c. kajian kebutuhan dan permintaan	Hard copy/soft copy berupa dokumen kelayakan teknis	089	Ahli Utama	Undang-undang terkait cipta kerja Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko Peraturan Menteri terkait pengkajian dan/atau pembuddayaan ikan di wilayah pengembangan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
82.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	<p>crusing dan wisata antara lain pesisir/pantai, mangrove, voli pantai, bejermar (sun bathing), sepeda pantai yang feasible dan berkelanjutan yang mencakup:</p> <p>a. penyusunan kerangka konsep, kerangka pikir/ kerangka kerja (logical framework)</p> <p>b. koordinasi dan FGD studi kelayakan dokumen teknis pengusahaan wisata bahari</p>	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	0,95	<p>f. kajian kelayakan lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan operasional lay out rencana kegiatan</p> <p>g. desain dasar (basic design) dan rekomendasi</p>	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan teknis	090	Ahli Madya	<p>peraturan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari</p> <p>e. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan</p> <p>a. Undang-undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penziman berbasis risiko</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pemangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari</p> <p>e. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
83.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup: a. menyusun kebutuhan dan metode inventarisasi data yang diperlukan b. pengelompokan/klasifikasi data sesuai kebutuhan c. analisis bahan	Laporan analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	0,47	Laporan hasil analisis berupa: a. analisis terhadap tata ruang wilayah b. analisis permintaan dan kebutuhan c. analisis kondisi eksisting d. analisis data untuk kebutuhan desain dasar (<i>basic design</i>)	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	091	Ahli Muda	parwisata alam perairan a. Undang-undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko c. Peraturan Menteri terkait pengalokasian dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial d. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari e. Peraturan menteri yang menyetujui/urutan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berke-lanjutan f. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan alam perairan
84.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Identifikasi bahan yang mencakup: a. inventarisasi data umum, data teknis, kualitatif, dan kuantitatif sebagai bahan yang relevan dan perlu dicatu dalam penyusunan studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari b. survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuisioner c. memilah, merangkum, dan menyajikan data berupa	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	0,34	Laporan identifikasi bahan memuat: a. hasil inventarisasi data antara lain berupa: 1. data kondisi ekosistem 2. data obyek wisata bahari 3. data sosial ekonomi 4. data prasarana dan sarana 5. data kunjungan wisatawan b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel,	Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi bahan	092	Ahli Pertama	Undang-undang terkait cipta kerja Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko Peraturan Menteri terkait pengalokasian dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang bukan tujuan komersial

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturuan d. menyusun laporan			data peraturan, foto, berita, dan fitur				d. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari e. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan f. Peraturan Menteri terkait kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan
85.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT antara lain berupa pengangkutan, pemanfaatan existing dan insitu, pemeliharaan, dan pemeliharaan BMKT di <i>water house</i> / galeri BMKT mencakup: a. penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir / kerangka kerja (<i>logical framework</i>) b. koordinasi dan FGD c. finalisasi dokumen studi kelayakan pengelolaan BMKT	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	1,00	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT memuat: a. rencana kegiatan dan rencana kerja b. gambaran umum, metode, tinjauan umum c. kajian kebutuhan dan permintaan d. kajian kelayakan lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan operasional e. <i>lay out</i> rencana kegiatan f. desain dasar (<i>basic design</i>) g. kesimpulan dan rekomendasi	<i>Hard copy</i> / <i>soft copy</i> berupa dokumen studi kelayakan teknis	093	Ahli Utama	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
86.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi wilayah studi, kebutuhan, permintaan, dan kondisi	Dokumen hasil evaluasi analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	0,91	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis BMKT berupa draft dokumen studi kelayakan teknis yang memuat: a. rencana kegiatan	<i>Hard copy</i> / <i>soft copy</i> draft dokumen studi kelayakan teknis	094	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>eksisting</p> <p>b. membuat draft <i>lay out</i> rencana kegiatan</p> <p>c. menyusun draft desain dasar</p>			<p>b. ringkasan gambaran umum, metode, dan rencana kerja</p> <p>c. tinjauan umum</p> <p>d. kajian teknis kebutuhan dan permintaan</p> <p>e. identifikasi kelayakan antara lain lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan operasional</p> <p>f. draft <i>lay out</i> rencana kegiatan</p> <p>g. draft desain dasar (<i>basic design</i>)</p>				<p>pemerintahan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan kecamatan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor kelurahan dan perkotaan</p>
87.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	<p>Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup:</p> <p>a. menyusun kebutuhan dan metode inventarisasi data yang diperlukan</p> <p>b. pengelompokan/klasifikasi data sesuai kebutuhannya</p> <p>c. analisis bahan</p>	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	0,44	<p>Laporan hasil analisis berupa:</p> <p>a. analisis terhadap tata ruang wilayah</p> <p>b. analisis permintaan dan kebutuhan</p> <p>c. analisis kondisi eksisting</p> <p>d. analisis data untuk kebutuhan desain dasar (<i>basic design</i>)</p>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	095	Abdi Mada	<p>a. Undang-Undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan kecamatan</p>
88.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	<p>Identifikasi bahan yang mencakup:</p> <p>a. inventarisasi data umum, data teknis, kualitatif, dan kuantitatif sebagai bahan yang relevan dan perlu</p>	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	0,35	<p>Laporan identifikasi bahan meliputi:</p> <p>a. hasil inventarisasi data antara lain berupa:</p> <p>1. hidro-oseanografi tidak terbatas pada batimetri,</p>	Hard copy/soft copy hasil identifikasi bahan	096	Abdi Pertama	<p>a. Undang-Undang terkait cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan,</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
89.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	<p>dacu dalam penyusunan studi kelayakan teknis BMKT survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuesioner</p> <p>b. memilah, merangkum, dan menyajikan data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peratuman</p> <p>c. menyusun laporan</p>	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	1,18	<p>arus, pasang surut, gelombang, dan ekosistem</p> <p>2. data lokasi titik dan kondisi BMKT, kronologis penemuan, serta sejarah maritim BMKT</p> <p>3. kebutuhan peralatan pengangkutan</p> <p>4. kebutuhan sarana penunjang BMKT</p> <p>5. kebutuhan tenaga kerja dan tenaga ahli yang terdiri atas peragambaran, video, dan foto</p> <p>b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peratuman</p>	Hard copy/soft copy berupa dokumen kelayakan teknis	097	Ahli Utama	<p>perencanaan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penkaban dan kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berwisata berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
		<p>Studi kelayakan pengelolaan sumber daya nonkonvensional, mencakup:</p> <p>a. penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>)</p> <p>b. koordinasi dan FGD ke layakan</p> <p>c. finalisasi dokumen studi kelayakan sumber daya nonkonvensional</p>	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional		<p>Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional memuat:</p> <p>a. hasil koordinasi/FGD</p> <p>b. rencana kegiatan</p> <p>c. gambaran umum, metode, dan rencana kerja</p> <p>d. tinjauan umum</p> <p>e. kajian kebutuhan dan permintaan</p> <p>f. kajian kelayakan lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan operasional</p> <p>g. <i>lay out</i> rencana kegiatan</p> <p>h. desain dasar (<i>basic design</i>)</p> <p>i. kesimpulan dan rekomendasi</p>			<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan</p>	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
90.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelahan sumber daya nonkonvensional	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi wilayah studi, kebutuhan dan permintaan, kondisi eksisting b. membuat draft lay out rencana kegiatan c. menyusun draft desain dasar	Dokumen hasil evaluasi studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional	0,82	Dokumen evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan teknis pengelahan sumber daya nonkonvensional berupa draft dokumen studi kelayakan teknis yang memuat: a. rencana kegiatan b. ringkasan gambaran umum, metode, dan rencana kerja c. tinjauan umum d. kajian teknis kebutuhan dan permintaan e. indikasi kelayakan antara lain lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, dan kegiatan f. draft lay out rencana kegiatan g. draft desain dasar (basic design)	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan teknis	098	Abli Madya	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
91.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelahan sumber daya nonkonvensional	Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup: a. menyusun kebutuhan dan metode inventarisasi data yang diperlukan yang diperlukan data sesuai kebutuhan c. analisis bahan	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelahan sumber daya nonkonvensional	0,47	Laporan hasil analisis berupa: a. analisis terhadap tata ruang wilayah studi b. analisis permintaan dan kebutuhan c. analisis kondisi eksisting d. analisis data untuk kebutuhan desain dasar (basic design)	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	099	Abli Madya	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
92.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	Identifikasi bahan yang mencakup: a. inventarisasi data umum, data teknis, kualitatif, dan kuantitatif sebagai bahan yang relevan dan perlu dilacu dalam penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional antara lain data batimetri, topografi, arus, angin, gelombang, pasang surut, hidrometri, hidrologi, mekanika tanah/geoteknik, geomorfologi dan geologi laut b. survei lapangan dan/atau pengumpulan data melalui kuasasmer c. memilah, merangkum, dan menyajikan data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturam d. menyusun laporan	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya non konvensional	0,26	Laporan hasil identifikasi bahan memuat: a. hasil inventarisasi data antara lain: 1. data batimetri, topografi, arus, angin, gelombang, pasang surut, hidrometri, hidrologi, mekanika tanah/geoteknik, geomorfologi dan geologi laut 2. data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun, estuari), laguna, teluk, delta, gumuk pasir, pantai, dan/atau populasi ikan 3. data sosial, ekonomi, dan budaya, 4. data pemanfaatan ruang laut yang telah ada 5. data risiko bencana 6. data karakteristik fisika dan kimia (air dan udara) 7. data kondisi biologi (flora, fauna, dan mamalia) 8. dokumen perencanaan pemanfaatan peraturam pesisir b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturam.	Hard copy/soft copy laporan identifikasi bahan	100	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah tentang pengorganisasian bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
93.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan	Finansial pengelolaan bangunan dan instalasi laut mencakup:	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan	1,00	Dokumen studi kelayakan ekonomi pengelolaan bangunan laut dan instalasi	Hard copy/soft copy berupa	101	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	a. penyusunan konsep dan kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>) b. koordinasi dan meneliti c. mengskan dan meneliti d. finalisasi dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut sesuai fungsi perikanan, perikanan, wisata bahari, pelayaran, perhubungan, telekomunikasi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, instalasi ketenagalistrikan, penyediaan sumber daya air, dan pemanfaatan air laut selain energi	finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut		laut yang memuat: a. kelayakan ekonomi kegiatan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengelolaan sumber daya pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut yang meliputi: 1. studi kelayakan finansial antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut 2. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , 3. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> c. kelayakan ekonomi secara total d. kesimpulan kelayakan dan rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial	dokumen kelayakan ekonomi dan finansial studi kelayakan ekonomi dan finansial			kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah c. Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
94.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> , <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , <i>Net</i>	Dokumen hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut	0,76	Draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pengelolaan bangunan laut	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	102	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
95.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengeluaran bangunan laut dan instalasi laut	Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), dan Discounted Payback Period (DPP) b. penyusunan draft dokumen kelayakan ekonomi finansial	dan Instalasi laut	0,54	dan instalasi laut, yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengeluaran sumber daya pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut yang meliputi: 1. studi kelayakan finansial ekonomi antara lain analisis Net Present Value (NPV) dari rencana pemanfaatan air laut 2. Internal Rate of Return (IRR) 3. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) 4. Discounted Payback Period (DPP), c. kelayakan ekonomi secara total	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	103	Ahli Muda	<p>pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota</p> <p>Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan penkaban</p> <p>Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berwujud berbasis risiko sektor kelurahan dan perkotaan</p> <p>a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain daerah provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan penkaban d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
96.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan Instabilitas laut	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. merangkum data berupa: 1. nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya bahan, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, dan suku bunga c. penyajian data	Laporan identifikasi bahan akan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan Instabilitas laut	0,27	Laporan Identifikasi bahan berupa: a. hasil inventarisasi data memuat biaya investasi, biaya kegiatan, biaya laban, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, dan suku bunga b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peratumun	Hard copy/soft copy hasil identifikasi	104	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
97.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi mencakup kegiatan perumusan dalam penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial meliputi: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan reklamasi, yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengelolaan reklamasi, nilai manfaat	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial reklamasi	1,00	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial reklamasi yang memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan reklamasi, yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengelolaan reklamasi yang meliputi: 1. studi kelayakan	Hard copy/soft copy berupa dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	105	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
98.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial reklamasi	ekonomi bagi masyarakat dengan adanya pengeblaan reklamasi, nilai asuransi lingkungan bagi pengelola kegiatan pengeblaan reklamasi yang dilaksanakan melalui FGD/koordinasi secara internal/lintas sektor yang mencakup: 1. penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir/ kerangka kerja (<i>logical framework</i>) 2. koordinasi dan FGD 3. finalisasi dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	Dokumen hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial dan pengelanaan reklamasi	0,66	ekonomi analisis meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> , <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , 3. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> e. kelayakan ekonomi secara total d. kesimpulan dan rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial	<i>Hard copy/soft copy</i> draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	106	Abili Marha	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
99.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup perhitungan kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup klasifikasi data terkait perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	0,51	3. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> Laporan hasil analisis berupa hasil analisis untuk kelayakan ekonomi dan finansial yang berupa perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> , dan d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	107	Abdi Mulya	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
100.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. mengumpulkan data berupa: 1. nilai investasi, sumber dana, jumlah pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi,	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	0,34	Laporan identifikasi bahan berupa: a. hasil inventarisasi data berupa biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, dan suku bunga b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturam	Hard copy/soft copy laporan identifikasi	108	Abdi Pertama	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
101.	Melakukan penyusunan dokumen kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	dan bukti berupa penyajian data studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut berupa produk antara lain desain, air laut dalam, dan mineral lainnya) dan air laut untuk pelayanan antara lain <i>cooling water</i> , perikanan <i>biohidroa</i> , dan kegiatan lainnya yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>) koordinasi dan FGD finalisasi dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial 	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut dan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	1,18	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut memuat: <ol style="list-style-type: none"> kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pemanfaatan air laut, yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan kelayakan sosial ekonomi dalam pemanfaatan air laut yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan ekonomi antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> kelayakan ekonomi secara total kesimpulan dan rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial 	<i>Hard copy/soft copy</i> berupa dokumen studi ekonomi dan finansial	109	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
102.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup kegiatan:	Dokumen hasil evaluasi analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial	0,82	Draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut memuat: <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut 	<i>Hard copy/soft copy</i> draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	110	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pemanfaatan air laut	a. melakukan evaluasi analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> , <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> , dan <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> b. penyusunan draft dokumen kelayakan ekonomi dan finansial	finansial pemanfaatan air laut		a. kelayakan ekonomi dan finansial yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan penentuan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan dalam pemanfaatan air laut meliputi: 1. studi kelayakan ekonomi finansial analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut 2. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> 3. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>				antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
103.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi finansial yang mencakup perhitungan kelayakan ekonomi dan perhitungan kelayakan finansial yang meliputi klasifikasi data terkait perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	0,45	Laporan hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial yang berupa perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	<i>Hard copy/soft copy</i> laporan hasil analisis	111	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berbasis risiko sektor

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
104.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. merangkum data berupa: 1. nilai investasi, sumber dana, investasi, jaminan pemenuhan investasi, dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, dan suku bunga c. penyajian data	Laporan identifikasi bahan kelayakan ekonomi dan finansial dan pemertabatan air laut	0,25	Laporan identifikasi bahan berupa: a. hasil inventarisasi data berupa biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga b. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan	Hard copy/soft copy hasil identifikasi bahan	112	Ahli Pertama	kegiatan dan perikanan a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
105.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan bioteknologi laut	Studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelanaan bioteknologi dan bioteknologi laut yang mencakup: a. penyusunan kerangka pikir/ konsep, kerangka kerja (logical framework) b. koordinasi dan FGD c. finalisasi dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial dan pemertabatan bioteknologi dan bioteknologi laut	1,15	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelanaan bioteknologi dan bioteknologi laut memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pengelanaan bioteknologi dan bioteknologi laut yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan sosial ekonomi dalam pengelanaan bioteknologi dan bioteknologi laut yang meliputi: 1. studi kelayakan ekonomi finansial)	Hard copy/soft copy berupa dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	113	Ahli Utama	Undang-Undang terkait cipta kerja Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berusaha berbasis risiko sektor

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
106.	Melakukan evaluasi bahan analisis penyusunan dokumen studi kelayakan teknis (ekonomi) pengeluaran dan bioteknologi laut	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengeluaran bioteknologi laut yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi analisis antara lain meliputi: <i>Net Present Value (NPV)</i> , <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> , <i>Net Payback Period (DPP)</i> b. penyusunan draft dokumen kelayakan ekonomi dan finansial	Dokumen hasil evaluasi analisis dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan bioteknologi laut	0,76	Draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengeluaran bioteknologi laut memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pengeluaran bioteknologi laut yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan dalam pengelolaan bioteknologi laut yang meliputi: 1. studi kelayakan ekonomi dan finansial analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut 2. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> 3. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> e. kelayakan ekonomi secara total d. kesimpulan dan rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial	<i>Hard copy/soft copy</i> draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	114	Ahli Madya	kelautan dan perikanan a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
107.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial biomarkologi dan bioteknologi laut	Analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup perhitungan kelayakan ekonomi dan finansial yang meliputi klasifikasi data terkait perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomarkologi dan bioteknologi laut	0,51	Laporan hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial yang berupa perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pemanfaatan air laut b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	115	Abdi Mada	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah urusan pemerintahan, antara lain, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
108.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomarkologi dan bioteknologi laut	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. mengumpulkan data berupa: 1. nilai investasi, sumber dana, jumlah pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi,	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomarkologi dan bioteknologi laut	0,30	Laporan Identifikasi bahan berupa: a. hasil inventarisasi data berupa biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga b. penyajian data berupa tabel data, grafik, tabel, dan data peraturan	Hard copy/soft copy laporan hasil identifikasi bahan	116	Abdi Pertama	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah urusan pemerintahan, antara lain, peraturan daerah provinsi, dan peraturan kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
109.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari	<p>serta suku bunga c. penyajian data</p> <p>Studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka kerja (logical framework) koordinasi dan FGD realisasi dokumen kelayakan ekonomi dan finansial 	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari	1,18	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari memuat: <ol style="list-style-type: none"> kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pengusaha wisata bahari yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan penemuan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan kelayakan sosial ekonomi dalam pelaksanaan wisata bahari yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan ekonomi dan finansial antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengusaha wisata bahari <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> kelayakan ekonomi secara total kesimpulan dan rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial 	Hard copy/soft copy berupa dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	117	Abli Utama	<p>dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang terkait cipta kerja Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
110.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup	Dokumen hasil evaluasi analisis studi	0,79	Draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan ekonomi	118	Abli Madya	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang terkait Cipta Kerja Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
111.	studi ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	kegiatan: a. melakukan evaluasi analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> , <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> , dan <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> b. penyusunan draft dokumen kelengkapan ekonomi dan finansial	kegiatan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	0,47	<p>bahari memuat:</p> <p>a. kegiatan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari yaitu nilai investasi, penentuan jumlah sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan sosial ekonomi dalam perusahaan wisata bahari yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan ekonomi dan finansial analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana perusahaan wisata bahari <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> 	dan finansial	119	Ahli Muda	<p>terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	Analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup perhitungan ekonomi dan finansial yang meliputi klasifikasi data terkait perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana perusahaan wisata bahari b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	0,47	<p>Laporan hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial berupa perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana perusahaan wisata bahari <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> 	<p>Hard copy/soft copy laporan hasil analisis</p>	119	Ahli Muda	<p>a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
112.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. merangkum data berupa: 1. nilai investasi, sumber dana, jaminan pememinan, investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya labrak, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga c. penyajian data	Laporan identifikasi bahan kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari	0,33	Laporan identifikasi bahan berupa: 1. hasil inventarisasi data berupa biaya investasi, biaya kegiatan, biaya labrak, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, sector, dan data peraturan	Hard copy / soft copy hasil identifikasi	120	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah c. Peraturan Menteri terkait kabupaten/kota d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyenggaraan penanaman berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
113.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan BMKT	Studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan BMKT mencakup: a. penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir/kerangka kerja (logical framework) b. koordinasi dan FGD c. finalisasi dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan BMKT	1,00	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan BMKT memuat: a. kelayakan kegiatan ekonomi pengkayaan BMKT yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan pememinan, investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengkayaan BMKT yang meliputi: 1. studi kelayakan ekonomi dan finansial	Hard copy/soft copy berupa dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	121	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah daerah c. Peraturan Menteri terkait penyenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
114.	Melakukan evaluasi bahan hasil analisis penyusunan dokumen studi (ekonomi dan finansial) pengalihan BMKT	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> melakukan evaluasi analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i>, <i>Internal Rate of Return (IRR)</i>, <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i>, dan <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> penyusunan draft dokumen kelayakan ekonomi dan finansial 	Dokumen evaluasi analisis kelayakan ekonomi dan finansial pengalihan BMKT	0,78	Draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengalihan BMKT memuat: <ol style="list-style-type: none"> kelayakan ekonomi kegiatan pengalihan BMKT, yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan penemuan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan kelayakan sosial ekonomi dalam pengalihan BMKT yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan ekonomi dan finansial analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengalihan BMKT <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> e. kelayakan ekonomi secara total dan kesimpulan dan rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial	<i>Hard copy/soft copy</i> draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	122	Abdi Madya	<p>dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang terkait Cipta Kerja Penetapan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan pemerintah/kota Penetapan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Penetapan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
115.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelabahan BMKT	Analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup perhitungan kelayakan ekonomi dan finansial yang meliputi kualifikasi data terkait perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengelabahan BMKT b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelabahan BMKT	0,40	Laporan hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial berupa perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengelabahan BMKT b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	123	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan beresaha berbasis risiko sektor kelurahan dan perikanan
116.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelabahan BMKT	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan merangkum data berupa: 1. nilai investasi, jaminan dana, pemeliharaan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya bahan, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga c. penyajian data	Laporan identifikasi bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelabahan BMKT	0,41	Laporan identifikasi bahan berupa: a. uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan inventarisasi data berupa biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, suku bunga d. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan	Hard copy /soft copy laporan hasil identifikasi bahan	124	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan beresaha berbasis risiko sektor

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
117.	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional mencakup: a. penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir/kerangka kerja (<i>logical framework</i>) b. koordinasi dan FGD c. finalisasi dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional	1,18	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pengelolaan sumber daya nonkonvensional yaitu nilai investasi, sumber dana, jaminan penembuan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengalokasian sumber daya nonkonvensional meliputi: 1. studi kelayakan ekonomi dan finansial antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengelolaan sumber daya nonkonvensional 2. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> 3. <i>Net Benefit/Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> c. kelayakan ekonomi secara	<i>Hard copy/soft copy</i> berupa dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	125	Ahli Utama	kelautan dan perikanan a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait pengalokasian bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
118.	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional	Evaluasi hasil analisis bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup kegiatan: a. melakukan evaluasi analisis antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> , <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> , dan <i>Discounted Payback Period (DPP)</i> b. penyusunan draft dokumen kelayakan ekonomi dan finansial	Dokumen evaluasi hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional	0,74	total d. kesimpulan dan rekomendasi ekonomi dan finansial Draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial kegiatan pengelolaan sumber daya nonkonvensional yaitu nilai investasi, sumber jaminan, pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan keuangan b. kelayakan sosial ekonomi dalam pengelolaan sumber daya nonkonvensional yang meliputi: 1. studi kelayakan ekonomi dan finansial antara lain meliputi <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengelolaan sumber daya nonkonvensional 2. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> 3. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> 4. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	Hard copy/soft copy draft dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	126	Abdi Madya	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penggunaan bidang kelurahan dan kecamatan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelurahan dan perkotaan
119.	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional	Analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial yang mencakup perhitungan kelayakan ekonomi dan finansial yang meliputi	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial	0,40	Laporan hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial berupa perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	127	Abdi Muda	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	daya nonkonvensional	klasifikasi data terkait perhitungan: a. <i>Net Present Value (NPV)</i> dari rencana pengeluaran sumber daya nonkonvensional b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	pengelahan daya sumber nonkonvensional		b. <i>Internal Rate of Return (IRR)</i> , c. <i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i> d. <i>Discounted Payback Period (DPP)</i>				pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan pekonan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berwujud berbasis risiko sektor kelurahan dan pekonan
120.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengeluaran sumber daya nonkonvensional	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan rekrusai b. merangkum data berupa: 1. nilai investasi, sumber dana, jaminan pemenuhan investasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta laporan keuangan 2. biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga c. penyajian data	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengeluaran sumber daya nonkonvensional	0,31	Laporan Identifikasi bahan berupa: 1. hasil inventarisasi data berupa biaya investasi, biaya kegiatan, biaya lahan, perhitungan manfaat infrastruktur, biaya operasi dan pemeliharaan, inflasi, serta suku bunga 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturuan	Hard copy/soft copy laporan Identifikasi bahan	128	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelurahan dan pekonan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berwujud berbasis risiko sektor kelurahan dan pekonan
121.	Melakukan identifikasi pengeluaran bangunan laut, reklamasi, wisata bahari, rekayasa, BMKT, atau sumber daya bahari, BMKT, atau sumber daya	Identifikasi pengeluaran bangunan laut dan instalasi BMKT, atau sumber daya nonkonvensional mencakup: a. penyusunan kerangka kerja	Laporan identifikasi bangunan laut dan instalasi BMKT, atau reklamasi laut, rekayasa, dan instalasi	0,43	Laporan hasil identifikasi bahan yang berupa data: a. perencanaan (<i>planning</i>) b. lembaga pengelola (<i>organizing</i>) c. pelaksanaan (<i>action</i>)	Hard copy/soft copy berupa laporan Hasil Identifikasi	129	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	nonkonvensional	<p>(logical/framework)</p> <p>b. inventarisasi data</p> <p>c. pengelompokan</p> <p>d. penyusunan deskripsi/namasi rangkaian data</p> <p>e. penyajian data tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan</p>	<p>wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional</p>		d. pengawasan (controlling)				<p>urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor berbasis risiko kelautan dan perikanan</p>
122.	Melakukan identifikasi pemanfaatan air laut/bioteknologi dan bioteknologi laut	<p>Identifikasi pemanfaatan air laut/bioteknologi mencakup:</p> <p>a. koordinasi</p> <p>b. inventarisasi data sekunder</p> <p>c. Inventarisasi data primer (survei lapangan dan kuesioner) serta pemeriksaan lapangan (ground check)</p> <p>d. pengelompokan</p> <p>e. penyusunan deskripsi/narasi rangkuman data</p> <p>f. penyajian data tabulasi data, grafik, tabel, dan kumpulan data peraturan, publikasi ilmiah, publikasi populer, dan film)</p>	<p>Laporan identifikasi pemanfaatan air laut, bioteknologi, dan bioteknologi laut</p>	0,26	<p>Laporan identifikasi bahan yang memuat:</p> <p>a. bahan baku</p> <p>b. jenis pemanfaatan</p> <p>c. metode eksploitasi</p> <p>d. produksi, pengolahan, dan pemasaran</p> <p>e. penggunaan</p>	Hard copy/soft copy berupa laporan identifikasi	130	Ahli Pertama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor berbasis risiko kelautan dan perikanan</p>
123.	Melakukan identifikasi pembiayaan sumber	<p>Identifikasi sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan</p>	<p>Laporan identifikasi</p>	0,44	<p>Laporan identifikasi memuat:</p> <p>a. jenis perusahaan</p>	Hard copy/soft copy berupa laporan identifikasi	131	Ahli Muda	<p>a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
124.	pengusahaan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau perairan pedalaman dan/atau perairan	untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau perairan pedalaman dan/atau perairan	sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan	0,46	b. alokasi sumber biaya c. identifikasi sumber pembiayaan yang relevan d. identifikasi penemuan sumber pembiayaan e. kelestarian	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	132	Ahli Muda	urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait tata cara penetapan sumber pembiayaan dan pencarian sumber pembiayaan alternatif b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pemberian dukungan kelurahan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur
125.	Melakukan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan	Mengidentifikasi pemanfaatan aset untuk jasa kelautan mencakup: a. pengumpulan data sekunder dan data primer (survei lapangan dan kuisioner) b. data primer (survei lapangan dan kuisioner) c. pemeriksaan lapangan (ground check) d. menyusun laporan identifikasi	Laporan identifikasi model bisnis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan	0,46	laporan identifikasi memuat data terkait: a. customer segments (segmentasi konsumen) b. value proposition (proposisi nilai konsumen) c. channels saluran (sumber pendapatan) d. revenue streams (sumber pendapatan) e. key resource (sumber daya) f. customer relationship (hubungan konsumen) g. key activities (aktivitas yang dijalankan) h. key partnership (kerja sama) i. cost structure (struktur biaya)	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	133	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan BMN f. Peraturan menteri yang menyelenggarakan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
126.	Melakukan Identifikasi perusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis nilai ekonomi	<p>kuesioner) dan pemeriksaan lapangan (<i>ground check</i>)</p> <p>c. identifikasi bentuk pemanfaatan aset berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah/bangun serah guna, penyediaan infrastruktur dan terbatasi untuk pembiayaan infrastruktur</p> <p>d. identifikasi pemenuhan kebutuhan pemanfaatan aset</p> <p>e. identifikasi bentuk pemanfaatan lainnya berupa <i>public private partnership</i></p> <p>Identifikasi perusahaan jasa dan sumber daya kelautan berbasis nilai ekonomi mencakup: konsep</p> <p>a. penyusunan pikir/kemangka pikir</p> <p>b. desk study dan observasi langsung</p> <p>c. identifikasi data dan informasi antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nilai ekonomi berbasis pemanfaatan (<i>use value</i>) 2. nilai penggunaan langsung (<i>direct value</i>) 3. nilai penggunaan tidak langsung (<i>indirect value</i>) 4. nilai pilihan (<i>option value</i>) 5. nilai ekonomi berbasis non pemanfaatan (<i>non use value</i>) 6. nilai bequest (<i>bequest value</i>) 7. nilai eksistensi (<i>existence value</i>) <p>d. Klasifikasi data dan informasi</p>	<p>pengusahaan jasa kelautan</p> <p>Laporan identifikasi perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis nilai ekonomi</p> <p>Peta lokasi</p>	0,45	<p>2. bentuk pemanfaatan BMN</p> <p>3. mitra pemanfaatan</p> <p>4. jangka waktu</p> <p>5. besaran kontribusi</p> <p>b. pemanfaatan non BMN antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. model pembiayaan 2. model pemanfaatan 3. <i>profiling investor</i> 4. <i>profiling usaha</i> 5. <i>profiling</i> pendapatan negara <p>Laporan identifikasi memuat:</p> <p>a. hasil identifikasi antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nilai ekologi (<i>ecological value</i>) 2. nilai sosial budaya (<i>social cultural value</i>) 3. nilai total ekonomi (<i>total economic value</i>) <p>b. resume hasil identifikasi</p>	<p>Hard copy/soft copy berupa laporan Hasil Identifikasi</p>	134	Ahli Muda	<p>urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara</p> <p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
127.	Melakukan penyusunan	Kegiatan penyusunan	Peta lokasi	0,94	Peta lokasi perusahaan jasa	Hard copy/soft copy	135	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	peta lokasi perusahaan jasa kelautan	lokasi perusahaan jasa kelautan meliputi: a. inventarisasi data dan referensi b. pengolahan data berupa kompilasi data, dan pembaruan data, dan validasi data c. membuat basis data (<i>database</i>) dengan sistem informasi geografis d. penyusunan dan <i>updating</i> data dan in- <i>figurasi</i> melokalan e. pembaruan (<i>updating</i>) peta dan basis data f. menampilkan peta dan basis data dalam bentuk website untuk publikasi	perusahaan jasa kelautan		kelautan, antara lain: a. memenuhi standar kualitas skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut sesuai SNI b. dilengkapi dengan metadata berupa riwayat data yang sekurang-kurangnya: 1. metode pengumpulan data 2. pengecaraan data 3. tanggal produksi data c. karakteristik sekurang-kurangnya: 1. kode unsur data geospasial tematik 2. nama unsur data geospasial tematik 3. klasifikasi unsur data geospasial tematik 4. data lintang (<i>latitude</i>) dan bujur (<i>longitude</i>) 5. informasi kualitas data geospasial tematik	berupa: a. peta wilayah perusahaan jasa kelautan b. peta persebaran perusahaan jasa kelautan c. peta status perusahaan jasa kelautan		pengecaraan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha e. Peraturan Menteri tentang pengelolaan risiko sektor kelautan dan perikanan f. Peraturan Menteri tentang pengelolaan data dan informasi dalam penyelenggaraan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
128.	Melakukan analisis bahan penyusunan peta lokasi perusahaan jasa kelautan	kegiatan analisis bahan penyusunan peta lokasi perusahaan jasa kelautan mencakup: a. verifikasi bahan peta potensi kualitas b. kontrol kualitas c. <i>overlay</i> peta d. pembuatan peta hasil analisis kuantitatif e. pendokumentasian publikasi f. pemutakhiran	Dokumen analisis lokasi perusahaan jasa kelautan	0,50	Laporan hasil analisis peta potensi berupa: a. peta sesuai standar kualitas berupa skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut b. peta hasil <i>overlay</i> c. analisis deskriptif	hard copy/soft copy laporan analisis peta lokal	136	Ahli Muda	Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha d. Peraturan Menteri tentang pengelolaan risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		h. pemantauan.							berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
129.	Melakukan penyusunan peta potensi jasa kelautan	Peta potensi pengusahaan jasa kelautan berupa data master dan data transaksi yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. pengolahan data berupa data, dan pembaruan data, dan validasi data c. membuat basis data (<i>database</i>) dengan sistem informasi geografis d. penyusunan dan <i>updating</i> data dan integrasi e. melakukan pengmasukan (<i>uploading</i>) peta dan basis data f. menampilkan peta dan basis data dalam bentuk website untuk publikasi	Peta pengusahaan jasa kelautan	0,94	Peta potensi pengusahaan jasa kelautan antara lain: a. memenuhi standar kualitas skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut sesuai SNI; dan b. dilengkapi dengan metadata berupa: 1. riwayat data paling sedikit: a) metode pengumpulan data b) penyelenggara data c) tanggal produksi data 2. karakteristik paling sedikit: a) kode unsur data geospasial tematik b) nama unsur data geospasial tematik c) klasifikasi unsur data geospasial tematik d) data lintang (<i>latitude</i>) dan bujur e) informasi kualitas data geospasial tematik	Hard copy/soft copy berupa: a. peta potensi pengusahaan jasa kelautan b. peta potensi investasi jasa kelautan	137	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
130.	Melakukan analisis bahan penyusunan peta potensi pengusahaan	Analisis hasil identifikasi bahan mencakup kegiatan: a. verifikasi bahan peta	Dokumen analisis potensi pengusahaan peta	0,61	Laporan hasil analisis peta potensi berupa: a. peta sesuai standar	Hard copy/soft copy laporan analisis peta potensi berupa peta potensi ke tersedian	138	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	jasa kelautan	a. potensi kualitas b. kontrol kualitas c. overlay peta d. pembuatan peta hasil overlay e. analisis kuantitatif f. pendokumentasian publikasi g. pemutakhiran h. pemanfaatan	jasa kelautan		a. kualitas berupa skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut b. peta hasil overlay c. analisis deskriptif	mineral, peta sebaran gelombang, dan peta sebaran pasang surut air laut			bidang kelautan dan perikanan Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
131.	Melakukan penyusunan basis data pengusahaan jasa kelautan untuk pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	a. Basis data pengusahaan jasa kelautan berupa: 1. data master 2. data transaksi dan data kelautan 3. data administrasi 4. data sumber daya dan lingkungan kelautan 5. sarana dan prasarana 6. sumber daya manusia kelautan, volume, nilai, dan hasil kelautan serta 7. pengawasan kelautan b. Kegiatan yang meliputi: 1. inventarisasi data dan referensi 2. pengolahan data berupa kompilasi data, pembersihan data, dan validasi data 3. membuat basis data (database)	Basis data pengusahaan jasa kelautan untuk pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,69	Basis data pengusahaan jasa kelautan harus memenuhi standar output data yakni: a. kode referensi b. format metadata berupa: 1. definisi 2. cakupan 3. klasifikasi 4. ukuran 5. satuan 6. sumber data 7. metodologi publikasi 8. metodologi 9. akses data	Hard copy/ soft copy basis data	139	Abdi Mulya	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUJAS	ACUAN
132.	Melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut	Verifikasi perizinan berusaha di laut mencakup: a. pemeriksaan kelengkapan dokumen (check list) b. menguji kesesuaian daya kelautan, teknis, peraturan, dan analisis kesesuaian lokasi sesuai zona c. melakukan koordinasi lapangan d. pemeriksaan check jika diperlukan e. menampatkan laporan hasil verifikasi	Dokumen izin berusaha pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,48	Dokumen hasil verifikasi berupa: a. verifikasi kesesuaian dokumen (check list) b. analisis kesesuaian lokasi, keayakan teknis, dan kesesuaian peraturan	Hard copy/ soft copy 1. dokumen hasil verifikasi 2. lembar check list	140	Ahli Muda	a. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perizinan ruang laut c. Peraturan Menteri terkait penataksanaan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya
133.	Melakukan analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Analisis dampak pengusahaan jasa kelautan mencakup kegiatan identifikasi dampak, menetapkan parameter pengukuran dampak, pengukuran besarnya dampak mikro, pengukuran besarnya dampak mikro, dan pengukuran dampak multiplier	Dokumen analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	1,25	Dokumen analisis dampak berupa: a. dokumen analisis multiplier dampak pengusahaan yang memuat: 1. dampak langsung 2. dampak tidak langsung 3. analisis input dan output 4. analisis multiplier dan rekomendasi b. dokumen analisis dampak pengusahaan yang mencakup: 1. identifikasi dampak 2. parameter dampak penentuan Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) dan Recovery Time Objective (RTO)	Hard copy/ soft copy 1. dokumen analisis multiplier dampak mikro 2. dokumen analisis pengusahaan (Business Impact Analysis (BIA))	141	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait wilayah pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
134.	Melakukan analisis tak-sasi BMKT	Analisis hasil tak-sasi BMKT yang meliputi: a. desk study dan inventarisasi data	Dokumen analisis tak-sasi BMKT	0,53	Dokumen hasil analisis tak-sasi BMKT yang memuat: a. dokumen pra tak-sasi sebagai panduan yang	Hard copy/soft copy berupa dokumen hasil analisis tak-sasi BMKT	142	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait wilayah pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>b. kompilasi data tak-sasi</p> <p>c. penyusunan dokumen pra verifikasi ke lingkungan dokumen tak-sasi</p> <p>d. verifikasi ke lingkungan dokumen resume dan rumusan tindak lanjut</p>			<p>memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang 2. ruang lingkup tak-sasi 3. waktu dan lokasi 4. kebutuhan sumber daya 5. uraian obyek tak-sasi <p>b. hasil verifikasi ke lingkungan dokumen tak-sasi</p> <p>c. dokumen rumusan tindak lanjut hasil tak-sasi yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. resume hasil tak-sasi 2. rumusan tindak lanjut 			<p>b. Undang-Undang terkait cagar budaya</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penanaman berbasis berbasah risiko</p>	
135.	Melakukan analisis peluang dan tantangan perusahaan jasa kelautan mencakup kegiatan:	<p>Analisis peluang dan tantangan perusahaan jasa kelautan mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi dan klasifikasi data (tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan) b. pra analisis c. membuat matrik peluang-tantangan, kekuatan, dan kelemahan, d. menyusun hasil analisis e. menyusun strategi dan aksi 	<p>Dokumen analisis peluang dan tantangan perusahaan jasa kelautan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. matrik peluang dan tantangan b. matrik kekuatan dan kelemahan c. strategi dan aksi 	0,66	<p>Dokumen analisis peluang dan tantangan perusahaan jasa kelautan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. matrik peluang dan tantangan b. matrik kekuatan dan kelemahan c. strategi dan aksi 	<p>Hard copy/soft copy dokumen analisis</p>	143	<p>Ahli Madya</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Menteri terkait urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan/kota c. Peraturan Menteri terkait urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
136.	Melakukan analisis ancaman eksternal perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan	<p>Analisis ancaman eksternal perusahaan jasa kelautan mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi dan klasifikasi data (data ancaman eksternal) b. membuat matrik ancaman 	<p>Dokumen analisis ancaman eksternal perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. politik b. ekonomi c. sosial 	0,66	<p>Dokumen analisis ancaman eksternal perusahaan jasa kelautan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. politik b. ekonomi c. sosial 	<p>Hard copy/soft copy dokumen analisis</p>	144	<p>Ahli Madya</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Menteri terkait urusan pemerintahan, pemerintahan daerah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	dan/atau yurisdiksi	eksternal c. menyusun hasil analisis d. penyusunan strategi dan aksi	pesair dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		d. teknologi e. matrik ancaman eksternal f. penyusunan strategi dan aksi				provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha bebasas risiko sektor kelautan dan perikanan
137.	Melakukan analisis daya dukung pengusahaan wisata bahari	Analisis daya dukung wisata bahari yang mencakup kegiatan: a. identifikasi dan analisis data dan informasi termasuk kunjungan lapang b. penyusunan parameter kesesuaian fisik dan biologi terhadap pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari c. pembobotan, kategori, dan skor untuk parameter fisik dan biologi d. perhitungan daya dukung ekologi dan fisik e. perhitungan daya dukung sosial f. perhitungan daya dukung ril g. perhitungan daya dukung efektif h. analisis daya dukung pengusahaan wisata bahari	Dokumen analisis daya dukung wisata bahari	0,54	Analisis daya dukung berupa: a. daya dukung sosial (Social Carrying Capacity (SCR)) b. daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity)	Hard copy/soft copy dokumen analisis hasil	145	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait tentang penyelenggaraan pematatan ruang laut
138.	Melakukan analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber	Analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut,	Dokumen analisis kesesuaian teknis untuk	0,68	Dokumen analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan berupa:	Hard copy/soft copy dokumen analisis kesesuaian teknis untuk	146	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	bioteknologi dan bioteknologi, wisata bahari, BMKT, dan sumber daya non konvensional yang mencakup perencanaan, kerangka kerja (logical framework), dan analisis kesesuaian teknis berupa: a. kesesuaian lokasi dan perlindungan sumber daya kelautan b. kestabilan sumber daya kelautan c. keamanan dan keselamatan pelayaran dan laut d. perlindungan masyarakat	pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		a. kesesuaian lokasi dan perlindungan sumber daya kelautan b. kestabilan sumber daya kelautan c. keamanan dan keselamatan pelayaran dan perlindungan laut e. perlindungan masyarakat	pengusahaan jasa kelautan			b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
139.	Melakukan analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	Analisis bahan yang mencakup kegiatan koordinasi, inventarisasi data, verifikasi lapangan, FGD, serta analisis dokumen berdasarkan persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	Dokumen analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	0,72	Dokumen analisis berupa memuat: a. kesesuaian lokasi dan/atau penempatan b. kesesuaian teknis pendirian dan/atau penempatan c. persyaratan pendirian dan/atau penempatan d. mekanisme pendirian dan/atau penempatan	Hard copy/soft copy dokumen analisis hasil	147	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
140.	Melakukan analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan yang mencakup identifikasi sumber pembiayaan, metode, instrumen, dan mekanisme sumber pembiayaan berupa: a. public budget (APBN, APBD, dan lain) b. program pemerintah (kredit	Dokumen sumber pembiayaan sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan	0,48	Dokumen hasil analisis yang memuat: a. sumber pembiayaan b. alokasi sumber biaya c. model pembiayaan d. skema pembiayaan e. struktur pembiayaan	Hard copy/soft copy dokumen analisis hasil	148	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
141.	Melakukan analisis perusahaan jasa keuangan untuk sumber daya kelanjutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	<p>mikro dan dana desa)</p> <p>c. pendanaan dari pihak customer, users fee (PES), dan biodiversity benefits</p> <p>d. badan layanan umum</p> <p>e. trust fund berupa pemerintah, filantropi, dan individual investment</p> <p>f. sektor perbankan</p> <p>g. skema investment informal (startup, crowd funding, P2P lending)</p> <p>h. sukuk</p> <p>Analisis sumber pembiayaan perusahaan jasa keuangan yang mencakup:</p> <p>a. inventarisasi sumber pembiayaan, metode, instrument, dan mekanisme sumber pembiayaan</p> <p>b. analisis deskriptif/kualitatif</p> <p>c. penyajian data dalam bentuk flowchart, grafik, dan tabel</p>	Dokumen analisis bisnis pengusahaan jasa keuangan	0,50	Dokumen hasil analisis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> sumber pembiayaan alokasi sumber biaya model pembiayaan skema pembiayaan struktur pembiayaan berupa: <ol style="list-style-type: none"> customer segments (segmentasi konsumen) value proposition (proposisi nilai konsumen) channels (saluran) revenue streams (sumber pendapatan) key resource (sumber daya) customer relationship (hubungan konsumen) key activities (aktivitas yang dijalankan) key partnership (kerja sama) cost structure (struktur biaya) 	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	149	Ahli Muda	<p>provinsi, dan daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>
142.	Melakukan analisis	Analisis kelembagaan usaha	Dokumen analisis	0,48	Dokumen kelembagaan analisis usaha	Hard copy/soft copy berupa dokumen	150	Ahli Muda	<p>a. Undang-undang terkait perlintungan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	kelembagaan usaha	<p>mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi dan penetapan masyarakat yang terlibat, masalah, <i>stakeholder</i> terkait, serta kajian dan berkolaborasi dengan pemangpin masyarakat, aktivis, <i>stakeholders</i> dan anggota masyarakat lainnya yang terkait dalam aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi analisis kelembagaan usaha antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> perembangan dan pembentukan kelembagaan kelembagaan pembiayaan usaha bentuk kelembagaan antara lain pramata sosial berdasar budaya setempat, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pengalihan dan pemasaran hasil, dan kelompok usaha badan layanan usaha kelembagaan usaha gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki masyarakat pesisir 	kelembagaan usaha	0,54	<p>mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> unsur-kelembagaan analisis <i>stakeholder</i> analisis kelembagaan analisis peranan dan keterkaitan kelembagaan model alternatif kelembagaan usaha rumusan kelembagaan usaha strategis 	hasil analisis			<p>pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
143.	Melakukan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkeanjutan berbasis wahana ekonomi	<p>Analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis wahana ekonomi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> desk study dan observasi langsung analisis berupa perhitungan nilai terkait pengusahaan 	Dokumen analisis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis wahana	0,54	<p>Laporan identifikasi memuat hasil analisis antara lain berupa perhitungan: <ol style="list-style-type: none"> nilai ekologi (ecological value) nilai sosial budaya (social cultural value) nilai total ekonomi (total </p>	Hard copy/soft copy berupa dokumen hasil analisis	151	Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
144.	Melakukan telaah teknis perizinan berusaha di laut	Telaah teknis perizinan berusaha di laut yang mencakup kegiatan: a. penyusunan kerangka konsep b. koordinasi dan pembahasan c. pemeriksaan lapangan d. analisis menyusun telaahan e. menyusun konsep telaahan perizinan	Dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut	1,06	Dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut memuat: a. analisis kelebihan dan kelemahan b. batasan dalam permohonan izin yang dibebaskan (izin yang diarahkan) c. dampak pemberian izin d. konsep/draft perizinan izin disertai persyaratan dan ketentuannya pelaksanaan izin	Hard copy/soft copy a. dokumen telaahan perizinan b. konsep/draft surat perizinan izin	152	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah provinsi, dan pemerintahan/daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
145.	Melakukan telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi dan analisis yang mencakup:	Telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi yang mencakup:	Dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi	0,58	Dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut memuat: a. analisis kelebihan dan kelemahan b. batasan dalam permohonan izin yang dibebaskan (izin yang diarahkan) c. dampak pemberian izin d. konsep/draft perizinan izin disertai persyaratan dan ketentuannya pelaksanaan izin	Hard copy/soft copy dokumen teknis	153	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut	a. menghitung potensi/ nilai proyeka/estimasi PNEP 1. melakukan validasi dokumen hasil verifikasi lain 2. Koordinasi dalam rangka menghitung potensi/ proyeka/estimasi nilai PNEP 3. menghitung nilai potensi/ proyeka/ estimasi berdasarkan hasil validasi 4. menyusun bahan telaahan perizinan b. menghitung PNEP definitif melalui: 1. perhitungan PNEP yang definitif terhadap izin yang telah disetujui 2. menggunakan hasil perhitungan kepada pimpinan unit kerja 3. menyampaikan PNEP definitif yang telah disetujui ke bendahara	ajak retribusi daerah perizinan berusaha di laut		a. menghitung proyeksi/ potensi/ estimasi PNEP b. analisis perhitungan proyeksi/ potensi c. menghitung PNEP definitif hasil d. perhitungan de-finitif ke pada pimpinan unit kerja untuk disahkan yang selanjutnya disampaikan ke bendahara				urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
146.	Melakukan penyusunan kajian reklamasi, bangunan dan instalasi pasir laut, garam, atau BMKT	Kajian reklamasi, bangunan dan instalasi pasir laut, garam, atau BMKT antara lain meliputi kajian kebijakan, pengusahaan, pemanfaatan, pasca produksi, kemitraan, dan diversifikasi yang mencakup kegiatan: a. penyusunan kerangka konsep/ke rangka pikir b. penentuan metode analisis data c. pemilihan metode analisis d. analisis kondisi/ situasi dan	Dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi pasir laut, garam, atau BMKT	0,87	Dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi pasir laut, garam, atau BMKT yang sekurang-kurangnya memuat: a. data dan informasi b. metode analisis c. analisis kondisi/ situasi dan permasalahan d. perencanaan number masalah e. analisis perbandingan model dengan kondisi riil (GAP analysis)	Hard copy/soft copy dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi pasir laut, garam, atau BMKT	154	Abdi Madya	a. Undang-Undang terkait cipta kerja b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait cipta kerja

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
147.	Menyusun rekomendasi untuk kegiatan pengusahaan pasir laut	<p>permasalahan sumber masalah perbandingan model dengan kondisi ril (GAP Analysis)</p> <p>Rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut antara lain berupa lokasi, program bilan (volume, waktu, dan metode), pengangkutan, pemanfaatan, dampak lingkungan dan sosial ekonomi, serta monitoring evaluasi pengusahaan pasir laut yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir pemilihan metode analisis analisis kondisi/situasi dan permasalahan sumber masalah penyusunan sumber masalah analisis perbandingan model dengan kondisi ril (GAP analysis) rekomendasi 	Dokumen rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut	1,06	<p>rekomendasi strategi dan kebijakan</p> <p>Dokumen rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan pasir laut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (policy brief) kerjas kerja kebijakan (policy paper) makalah kebijakan artikel kebijakan 	Hard copy/ soft copy <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (policy brief) kerjas kerja kebijakan (policy paper) makalah kebijakan artikel kebijakan 	155	Abdi Utama	<p>standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian permasalahan risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan
148.	Menyusun rekomendasi untuk penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut	Rekomendasi penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut meliputi penempatan, pembangunan dan pemeliharaan	Dokumen rekomendasi penempatan dan/atau pendirian	2,30	<p>Dokumen rekomendasi dan/atau bangunan dan instalasi laut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (policy 	Hard copy/soft copy rekomendasi penempatan dan/atau pendirian bangunan dan	156	Abdi Utama	<p>Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
149.	Menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut antara lain mencakup kegiatan:	<p>Instalasi laut fungsi perikanan, pengaman, wisata bahari, pelayaran, pertumbuhan darat, telekomunikasi, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, instalasi ketenagalistrikan, penyediaan sumber daya air, dan pemanfaatan air laut selain energi yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir pemilihan metode analisis analisis kondisi/situasi dan permasalahan penelusuran sumber masalah analisis perbandingan model dengan kondisi riil (GAP analysis) rekomendasi 	<p>Instalasi dan bangunan laut</p>	1,18	<p>brief kerja kebijakan (policy paper)</p> <p>c. makalah kebijakan</p> <p>d. artikel kebijakan</p>	<p>instalasi laut</p>	157	<p>terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan</p>	
	Rekomendasi pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut antara lain mencakup kegiatan:	<p>teknis reklamasi, kerangka konsep/kerangka pikir</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir pemilihan metode analisis analisis kondisi/situasi dan permasalahan penelusuran sumber masalah analisis perbandingan model dengan kondisi riil (GAP analysis) rekomendasi 	<p>Dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut</p>	1,18	<p>Dokumen rekomendasi untuk pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (policy brief) kerja kebijakan (policy paper) makalah kebijakan artikel kebijakan 	<p>Hard copy/soft copy rekomendasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (policy brief) kerja kebijakan (policy paper) makalah kebijakan artikel kebijakan 	<p>Ahli Utama</p>	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait</p>	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
150.	Menyusun rekomendasi untuk pengangkatan BMKT	Rekomendasi pengangkatan BMKT antara lain berupa BMKT di Perairan, BMKT yang telah diangkat, BMKT dapat diangkat dan/atau tidak, pemanfaatan BMKT yang bukan koleksi negara, pemanfaatan BMKT berdasarkan pengajuan oleh Kementerian, dan penyelesaian status pemanfaatan BMKT mencakup kegiatan: a. penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir b. pemilihan metode analisis c. analisis kondisi/situasi dan permasalahan sumber d. penelusuran masalah e. analisis perbandingan model dengan kondisi riil (GAP analysis) f. rekomendasi	Dokumen rekomendasi pengangkatan BMKT	1,00	Dokumen rekomendasi untuk pengangkatan BMKT berupa: a. risalah kebijakan (policy brief) b. kertas kerja kebijakan (policy paper) c. makalah kebijakan d. artikel kebijakan	Hard copy/soft copy Rekomendasi berupa: a. risalah kebijakan b. kertas kerja kebijakan (policy paper) c. makalah kebijakan d. artikel kebijakan	158	Ahli Utama	<p>standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian berurusan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan</p> <p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian berurusan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
151.	Menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan berbasis nilai-nilai ekonomi	Rekomendasi kegiatan untuk sumber daya kelanjutan berbasis nilai-nilai ekonomi mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir pemilihan metode analisis analisis kondisi/situasi dan permasalahan sumber masalah analisis perbandingan model dengan kondisi ril (KAP analitis) dengan mempertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> terjamin kualitas lingkungan yang lestari (<i>environmental sustainability</i>) perhatian masyarakat lokal yang lebih besar (<i>social sustainability</i>) terjamin adanya pelestarian budaya masyarakat (<i>culture sustainability</i>) tidak hanya melihat dari keuntungan secara ekonomi tetapi memperhatikan kualitas lingkungan 	Dokumen rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan berbasis nilai-nilai ekonomi	1,13	Dokumen rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan berbasis nilai-nilai ekonomi berupa: <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (<i>policy brief</i>) kertas kerja kebijakan (<i>policy paper</i>) makalah kebijakan artikel kebijakan 	Hard copy/soft copy rekomendasi berupa <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (<i>policy brief</i>) kertas kerja kebijakan (<i>policy paper</i>) makalah kebijakan artikel kebijakan 	159	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengkajian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman pemisahan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan
152.	Menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan wisata bahari	Rekomendasi kegiatan atau pengembangan wisata bahari berupa: <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir pemilihan metode analisis analisis kondisi/situasi dan permasalahan sumber masalah analisis perbandingan model dengan kondisi ril (KAP analitis) dengan mempertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> terjamin kualitas lingkungan yang lestari (<i>environmental sustainability</i>) perhatian masyarakat lokal yang lebih besar (<i>social sustainability</i>) terjamin adanya pelestarian budaya masyarakat (<i>culture sustainability</i>) tidak hanya melihat dari keuntungan secara ekonomi tetapi memperhatikan kualitas lingkungan 	Dokumen rekomendasi wisata bahari	1,18	Dokumen rekomendasi untuk pengembangan wisata bahari berupa: <ol style="list-style-type: none"> risalah kebijakan (<i>policy brief</i>) kertas kerja kebijakan (<i>policy paper</i>) makalah kebijakan artikel kebijakan 	Hard copy/soft copy <ol style="list-style-type: none"> Risalah Kebijakan (<i>policy brief</i>) kertas kerja kebijakan (<i>policy paper</i>) makalah kebijakan artikel kebijakan 	160	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengkajian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan, antara lain pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman pemisahan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		d. penelusuran masalah analisis perbandingan model dengan kondisi ril (GAP analysis) rekonestrasi sumber			d. artikel kebijakan	d. artikel kebijakan			provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
		e. analisis perbandingan model dengan kondisi ril (GAP analysis)							Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
		f. rekonestrasi sumber							Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha
									Peraturan Menteri terkait kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan risiko sektor kelautan dan perikanan
									Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan
153.	Menyusun rumusan strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	Rekomendasi pengembangan perusahaan jasa kelautan antara lain berupa strategi pengembangan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi, dan business plan, antara lain mencakup kegiatan: a. penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir b. pemilihan metode analisis c. analisis kondisi/situasi dan permasalahan sumber masalah d. penelusuran sumber masalah e. analisis perbandingan model dengan kondisi ril (GAP analysis) f. rekonestrasi	Dokumen strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	0,94	Dokumen strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan sekurang-kurangnya memuat: a. perumusan strategi alternatif strategi b. analisis SWOT c. pengembangan rencana usaha (business plan) berupa: 1. organisasi pengelola 2. strategi dan implementasi 3. uni pengelola 4. proyeksi surplus dan defisit e. implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha	Hard copy/ soft copy a. dokumen strategi pengembangan perusahaan b. dokumen business plan	161	Ahli Utama	Usdang-Usdang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
154.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	Evaluasi dan telaah analisis bahan antara lain mencakup kegiatan: a. FGD b. analisis SWOT berdasarkan hasil analisis bahan c. penyusunan proyek	Dokumen evaluasi hasil analisis strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	0,76	Dokumen evaluasi berupa draft dokumen strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan memuat: a. strategi b. alternatif strategi c. pengembangan rencana usaha (business plan) d. organisasi pengelola e. analisis pasar f. strategi dan implementasi g. umi pengelola h. analisis SWOT	Hard copy / soft copy Dokumen evaluasi	162	Ahli Muda	berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisa kebijakan e. a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisa kebijakan
155.	Menganalisis hasil	Analisis hasil identifikasi bahan	Laporan analisis	0,45	Laporan analisis hasil	Hard copy/soft copy	163	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUJAS	ACUAN
	Identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	berupa data terkait strategi, bisnis plan, data terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta pengelola kelayakan usaha yang mencakup kegiatan: a. klasifikasi data b. analisis kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan kebutuhan penyusunan draft	hasil identifikasi strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan		Identifikasi bahan memuat: a. analisis data terkait strategi b. analisis data business plan c. analisis data terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman d. analisis data pengelolaan usaha e. analisis data kelayakan f. kesimpulan	laporan analisis hasil identifikasi bahan			wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota Peraturan Pemerintah tentang penggantian bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan
156.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	Memeriksa bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. inventarisasi data hasil observasi melalui kuesioner, FGD, dan wawancara pada pihak terkait serta dokumentasi c. menngkum antara lain berupa: 1. bahan baku	Laporan identifikasi strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan	0,23	Laporan identifikasi bahan pengembangan jasa kelautan berupa: a. hasil inventarisasi data penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, flowchart, dan data peratuman	Hard copy/soft copy laporan identifikasi	164	Ahli Pertama	Undang-Undang terkait pengkayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
157.	Menyusun rumusan neraca komoditas pergarman dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas pergarman	<p>Identifikasi bahan yang mencakup:</p> <p>a. penyusunan kerangka pikir/ kerangka kerja</p> <p>b. konsultasi finalisasi draft rumusan neraca komoditas pergarman</p>	Dokumen neraca komoditas pergarman	1,18	Dokumen neraca komoditas pergarman yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> stok garam tahun sebelumnya; produksi garam dan rencana produksi garam tahun yang akan datang dan kebutuhan garam dan rencana kebutuhan garam tahun yang akan datang dan rumusan neraca pergarman 	Hard copy/soft copy dokumen neraca komoditas pergarman	165	Abdi Utama	<p>terkait penyelesaian dan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman pemulaan karya tulis ilmiah bagi analsis kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian dan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait pengendalian impor komoditas pergarman
158.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergarman dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas pergarman	<p>Evaluasi analisis neraca komoditas pergarman yang mencakup kegiatan:</p> <p>a. evaluasi stok garam tahun sebelumnya, rencana produksi garam tahun yang akan datang, dan kebutuhan garam dan rencana kebutuhan garam</p>	Dokumen hasil analisis neraca komoditas pergarman dalam rangka persetujuan impor komoditas pergarman	0,63	Evaluasi analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergarman berupa: <ol style="list-style-type: none"> evaluasi ketersediaan neraca komoditas pergarman. 	Hard copy/soft copy dokumen draft neraca komoditas pergarman	166	Abdi Madya	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian dan bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait pengendalian impor komoditas pergarman

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
159.	Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergamaman dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas pergamaman	tahun yang akan datang b. penyusunan draft neraca komoditas pergamaman Analisis hasil identifikasi bahan yang mencakup kegiatan verifikasi hasil inventarisasi data dan referensi, desk study, ground check, koordinasi, analisis, dan menyusun laporan.	Laporan analisis hasil identifikasi neraca komoditas pergamaman dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas pergamaman	0,63	Laporan analisis hasil identifikasi neraca komoditas pergamaman yang memuat: a. stok garam tahun sebelumnya b. produksi garam dan rencana produksi garam tahun yang akan datang c. kebutuhan garam dan rencana kebutuhan garam tahun yang akan datang	Hard copy/soft copy laporan analisis hasil identifikasi	167	Ahli Muda	a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan b. Peraturan Menteri terkait perdagangan impor komoditas pergamaman
160.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergamaman dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas pergamaman	Identifikasi bahan kegiatan mencakup inventarisasi data dan referensi (desk study), survey lapangan, kuesioner, serta merangkum dan menyajikan data berupa: a. stok garam tahun sebelumnya berupa: 1. sisa garam lokal yang tidak diserap 2. sisa garam impor yang tidak diserap b. produksi garam dan rencana produksi garam tahun yang akan datang berupa: 1. hasil produksi dari petambak garam rakyat pada tahun berjalan 2. hasil produksi garam dari badan usaha di dalam negeri pada tahun berjalan 3. rencana produksi dari petambak garam rakyat pada tahun yang akan datang	Laporan identifikasi neraca komoditas pergamaman dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas pergamaman	0,45	Laporan identifikasi bahan neraca komoditas pergamaman memuat: a. data stok garam tahun sebelumnya b. data produksi garam dan rencana produksi garam tahun yang akan datang c. data kebutuhan garam dan rencana kebutuhan garam tahun yang akan datang d. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan flowchart	Hard copy/soft copy laporan identifikasi	168	Ahli Pertama	a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan b. Peraturan Menteri terkait perdagangan impor komoditas pergamaman

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
161.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusutan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	<p>4. rencana produksi garam dari badan usaha di dalam negeri pada tahun yang akan datang</p> <p>c. kebutuhan garam dan rencana kebutuhan garam tahun yang akan datang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kebutuhan garam konsumsi pada tahun berjalan 2. kebutuhan garam non konsumsi pada tahun berjalan 3. kebutuhan garam konsumsi proyeksi kebutuhan garam yang akan datang 4. kebutuhan garam non konsumsi proyeksi kebutuhan garam yang akan datang 	Dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	0,68	Dokumen evaluasi dan telaah antara lain memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. pendididkan dan pelatihan nelayan b. ketrampilan nelayan kecil, tradisional, dan nelayan laruh, dan perempuan dan penyuluhan c. pendampingan kemitraan usaha d. pra produksi, pasca produksi, pengolahan, pemasaran, pengalihan, dan perlanjutan f. ketersediaan akses ilmu pengetahuan, dan informasi teknologi, dan informasi g. peningkatan kelemagaan h. pengembangan dan 	Hard copy/soft copy dokumen evaluasi dan telaah	169	Abdi Madya	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah terkait kemudaian, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
162.	Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya antara lain berupa: a. validasi dan klasifikasi data terkait: 1. pendidikan dan magang, beasiswa, pelatihan kewirausahaan 2. penyuluhan dan pendampingan 3. kemitraan usaha pasca produksi, pengolahan, pemasaran dan pengembangan 4. pengetahuan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, penyelarasan pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan ahli fungsi 5. kelembagaan b. analisis kualitatif dan kuantitatif	Analisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya antara lain berupa: a. validasi dan klasifikasi data terkait: 1. pendidikan dan magang, beasiswa, pelatihan kewirausahaan 2. penyuluhan dan pendampingan 3. kemitraan usaha pasca produksi, pengolahan, pemasaran dan pengembangan 4. pengetahuan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, penyelarasan pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan ahli fungsi 5. kelembagaan b. analisis kualitatif dan kuantitatif	Laporan analisis hasil identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	0,47	Laporan hasil analisis identifikasi bahan berupa: a. pendididkan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan c. kemitraan usaha d. pengetahuan akses ilmu dan informasi e. penguatan kelembagaan	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	170	Ahli Muda	a. Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
163.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan	Identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan	Laporan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan	0,41	Laporan identifikasi bahan berupa: a. hasil inventarisasi data	Hard copy/soft copy hasil identifikasi	171	Ahli Pertama	a. Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	petambang garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya	usaha bidang kelautan lainnya yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data dan referensi b. mengungkap dan pengumpulan data terkait pemberdayaan ekonomi antara lain berupa: 1. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan 2. potensi lahan dan air 3. sarana produksi 4. ketersediaan bahan baku 5. harga ikan 6. harga garam 7. peluang dan tantangan pasar 8. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut 9. wabah penyakit ikan 10. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan 11. pemberian subsidi dan bantuan modal 12. KUBE, kelompok budidaya, pengolah, pemasar c. penyajian data	masyarakat pesisir, petambang garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya	0,62	b. penyajian data berupa grafik, <i>flowchart</i> , tabel, tabulasi, dan gambar				b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
164.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan perincangan untuk usaha masyarakat pesisir, petambang garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	Evaluasi dan telaah yang mencakup kegiatan: a. penyediaan prasarana usaha b. kemudahan memperoleh sarana usaha c. jaminan kepastian usaha d. jaminan risiko usaha e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi f. pengendalian impor	Dokumen perincangan usaha masyarakat pesisir, petambang garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	0,62	Evaluasi dan telaah bahan memuat: a. uraian singkat tentang permasalahan b. evaluasi/teilah terhadap: 1. persoalan 2. praanggapan yang mempengaruhi pengaruh 3. fakta 4. analisis praanggapan dan fakta	Hard copy/soft copy dokumen evaluasi dan telaah	172	Ahli Madya	a. Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c. Peraturan Pemerintah terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
165.	Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	komoditas perikanan dan komoditas perikanan dan jaminan keamanan dan keselamatan fasilitas dan bantuan hukum	Laporan analisis hasil identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	0,48	terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan	Hard copy/soft copy laporan hasil analisis	173	Ahlil Muda	<p>dan perlindungan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata naskah dinas di lingkungan KKP</p> <p>a. Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata naskah dinas di lingkungan KKP</p>
166.	Melakukan identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk	identifikasi bahan kegiatan yang data dan referensi	Laporan identifikasi bahan penyusunan perlindungan	0,38	Laporan identifikasi bahan penyusunan perlindungan	Hard copy/soft copy dokumen evaluasi dan telaah	174	Ahlil Pertama	<p>a. Undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan,</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	<p>usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya</p>	<p>perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya dengan menggunakan serta penyajian data dan informasi terkait antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> data daya dukung sumber daya potensi sumber daya potensi lahan dan air rencana tata ruang perkembangan pengetahuan dan teknologi kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan usaha dan peluang usaha keberlanjutan usaha tingkat pertumbuhan ekonomi jumlah nelayan, petambak daya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha risiko usaha, kehadiran / masuknya sarana dan prasarana, asuransi, dan pembiayaan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kearifan lokal mitigasi risiko keamanan dan keselamatan masyarakat fasilitasi bantuan hukum 	<p>untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya</p>	<p>dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penyelenggaraan, perlindungan, penyelesaian, peradilan dan pemberdayaan, peradilan dan pengawasan, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat dan penyajian data berupa tabel, data, grafik, tabel, dan data peraturan</p>					<p>pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <ol style="list-style-type: none"> Penaturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Penaturan Pemerintah terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Penaturan Menteri terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam Penaturan Menteri terkait tata naekah dinas di lingkungan KKP

3. Sub Unsur Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengusahaan Jasa Kelautan untuk Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Perairan dan/atau Yurisdiksi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
1.	Menyusun rumusan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Rumusan pendampingan ke giatan pelaksanaan pendampingan berupa fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan, pendirian usaha, HAKI, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, pencatatan/leluasan, penyusunan business plan, dan pertemuan mitra usaha (business meeting) yang mencakup ke giatan.	Dokumen pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,83	Dokumen hasil pendampingan pengusahaan jasa kelautan, paling sedikit mencakup: a. ketentuan umum 1. sasaran dan asas kemasalahan yang timbul 2. permasalahan yang teknis dan manajemen usaha 3. aspek teknis dan upaya pengusahaan jasa kelautan meliputi kapasitas produksi dan pemasaran hasil	Hard copy/ soft copy dokumen pendampingan pengusahaan jasa kelautan	175	Ahlil Utama	a. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang de-sa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pedoman umum pendampingan de-sa

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>a. penyusunan kerangka konsep</p> <p>b. kerangka pikir/kerangka kerja</p> <p>c. koordinasi</p> <p>d. kunjungan lapangan jika diperlukan</p> <p>e. finalisasi draft dokumen hasil pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan</p>			<p>b. ketenagaan khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lokasi 2. wilayah kerja, tugas, dan fungsi pendamping 3. tenaga pendamping 4. metode pendampingan 5. hasil pendampingan 6. pengelolaan pendampingan dan rekomendasi 				<p>c. ketentuan terkait standar operasional prosedur pendampingan lembaga pengesala modal usaha kelanjutan dan perkembangan</p>
2.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	<p>Evaluasi pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan yang mencakup kegiatan pelaksanaan pendampingan yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kerangka kerja b. koordinasi c. kunjungan lapangan jika diperlukan d. penyusunan draft dokumen hasil pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan 	Dokumen evaluasi pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,65	<p>Dokumen evaluasi pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan berupa draft hasil pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketenagaan umum <ol style="list-style-type: none"> 1. sasaran dan asas komandatan yang timbul 2. permasalahan yang dihadapi teknis dan manajemen usaha 3. aspek teknis dan upaya perusahaan/jasa kelanjutan meliputi kapasitas produksi dan pemasaran hasil produksi b. ketenagaan khusus <ol style="list-style-type: none"> 1. lokasi 2. wilayah kerja, tugas, dan fungsi pendamping 3. tenaga pendamping 4. metode pendampingan 5. hasil pendampingan 6. pengelolaan pendampingan 	Hard copy/ soft copy draft dokumen hasil pendampingan perusahaan/jasa kelanjutan	176	Abdi Mulya	<p>a. Undang-Undang terkait perikanan dan pembenihan</p> <p>b. Peraturan menteri yang menyangkut urusan pemerintahan di bidang perikanan, daerah, dan tertinggal dan transmigrasi terkait pedoman umum pendampingan desa</p> <p>c. ketentuan terkait standar operasional prosedur pendampingan lembaga pengesala modal usaha kelanjutan dan perkembangan</p>
3.	Menganalisis hasil analisis hasil identifikasi bahan	<p>Analisis hasil identifikasi bahan pendampingan perusahaan</p>	Laporan analisis pendampingan perusahaan	0,48	<p>a. Laporan identifikasi bahan berupa data penyusunan draft master plan</p>	Hard copy/ soft copy dokumen evaluasi	177	Abdi Mulya	<p>a. Undang-Undang terkait perikanan dan pembenihan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pendampingan pengusaha jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	jasa kelautan yang mencakup: a. penyusunan kerangka kerja b. koordinasi c. kunjungan lapangan jika diperlukan	jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		b. rumusan pendampingan yang paling sedikit mencakup: 1. ketentuan umum a) sasaran dan asas pemanfaatan b) permasalahan yang timbul c) aspek teknis dan manajemen usaha d) upaya pengusahaan jasa kelautan meliputi kapasitas produksi dan pemasaran hasil produksi 2. ketentuan khusus a) lokasi kerja, tugas, dan fungsi pendamping c) tenaga pendamping d) metode pendampingan e) hasil tata cara pendampingan f) pengelolaan pendampingan	dan teleshop			b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terkait pedoman pendampingan desa a. ketentuan terkait standar operasional prosedur pendampingan lembaga pengelola usaha kelautan dan perikanan
4.	Melakukan identifikasi bahan pendampingan pengusaha jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan inventarisasi data desk study, survei, merangkum data lokasi, tenaga pendamping, kegiatan jenis, kapasitas pengusahaan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, produksi, dan pemasaran) berupa data dan informasi: a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan b. potensi lahan dan air c. sarana produksi d. ketersediaan bahan baku	Laporan identifikasi pendampingan pengusaha jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,26	Laporan identifikasi bahan yang meliputi: a. hasil inventarisasi data antara lain lokasi, tenaga pendamping, kegiatan jenis, kapasitas pengusahaan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, produksi, dan pemasaran b. penyajian data berupa tabel data, grafik, dan lain-lain	Hard copy/ soft copy dokumen erahua dan teleshop	178	Abdi Pertama	a. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terkait pedoman pendampingan desa c. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terkait pedoman pendampingan desa d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terkait pedoman pendampingan desa

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
5.	Menunuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan	<p>e. harga ikan</p> <p>f. peluang dan tantangan pasar</p> <p>h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut</p> <p>i. wabah penyakit ikan</p> <p>j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan</p> <p>k. pemberian subsidi dan bantuan modal</p> <p>Materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan berupa materi teknis, sosialisasi, bimbingan teknis, penyadaran masyarakat, publikasi ilmiah, buku, film, diseminasi, lokakarya, podcast, dan penyajian yang mencakup kegiatan:</p> <p>a. penyusunan kerangka konsep</p> <p>b. kerangka pikir/kerangka kerja</p> <p>c. finalisasi draft kajian dan materi teknis</p>	Dokumen materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan	1,11	<p>Dokumen materi teknis/ substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan berupa:</p> <p>a. Laporan C</p> <p>b. materi teknis sosialisasi/ bimbingan teknis/ penyadaran masyarakat/ publikasi ilmiah/buku/ film/diseminasi/ workshopy/lokakarya/ podcast/talkshow/ audio visual/ penyajian bahan pimpinan yang menarik, komunikatif, dan tepat sasaran</p>	<p>Hard copy/ soft copy</p> <p>a. draft kajian</p> <p>b. materi sosialisasi/ bimbingan teknis/ penyadaran masyarakat/ publikasi ilmiah/buku/ film/diseminasi/ workshopy/lokakarya/ podcast/ talkshow/ audio visual/ penyajian bahan pimpinan</p>	179	Ahli Utama	<p>operasional prosedur pendampingan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan</p> <p>a. Undang-Undang terkait pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analis</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
6.	Melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis / substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelanjutan	Draft kajian dan materi teknis/ substansi teknis pengusahaan jasa kelanjutan berupa materi sosialisasi, bimbingan teknis, penyadaran masyarakat, publikasi ilmiah, buku, film, diseminasi, <i>workshop</i> , lokakarya, podcast, dan penyajian bahan pimpinan yang mencakup kegiatan: a. supervisi draft awal b. perbaikan draft c. finalisasi draft kajian dan materi teknis	Dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan jasa kelanjutan	0,68	a. Draft teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelanjutan b. Draft materi teknis sosialisasi/bimbingan teknis/penyadaran masyarakat/publikasi ilmiah/buku/film/ <i>workshop</i> /lokakarya/podcast/talkshow/penyajian bahan pimpinan	Hard copy/soft copy draft kajian dan materi sosialisasi/bimbingan teknis/penyadaran masyarakat/publikasi ilmiah/buku/film/diseminasi/ <i>workshop</i> /lokakarya/podcast/talkshow/penyajian bahan pimpinan	180	Ahli Muda	kebijakan a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota c. Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan bidang kelautan dan perikanan d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan
7.	Menyusun kriteria analisis data teknis dan analisis materi dan informasi teknis bidang pengusahaan jasa kelanjutan	Laporan analisis yang mencakup kegiatan: a. verifikasi data b. klasifikasi kebutuhan penyusunan draft awal materi teknis	Laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa kelanjutan	0,49	Laporan analisis berupa analisis data dan informasi sebagai bahan materi teknis sosialisasi/bimbingan teknis/ penyadaran masyarakat/publikasi ilmiah/buku/film/diseminasi/ <i>workshop</i> /lokakarya/podcast/talkshow/penyajian bahan	Laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa kelanjutan	181	Ahli Muda	Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
8.	Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, penyajian materi teknis/substansi teknis bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Identifikasi bahan yang mencakup kegiatan: a. inventarisasi data referensi data yang bersangkutan dan instalasi laut, reklamasi, pemukiman air laut, bioteknologi dan BMKT, dan sumber daya perikanan laut	Data materi teknis/substansi bidang pengusahaan jasa kelautan	0,25	Laporan identifikasi bahan berupa: a. hasil inventarisasi data terkait kajian dan materi teknis b. penyajian data berupa tabel, grafik, foto, film, dan fluorchart	Hard copy/ soft copy data materi teknis	182	Ahli Pertama	<p>pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analisis kebijakan</p> <p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
9.	Melakukan perumusan data dan informasi dalam kegiatan supervisi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Perumusan data dan informasi yang mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kerangka konsep dan kerangka pikir/kerangka kerja penyusunan metode dan instrumen supervisi observasi lapangan evaluasi menyusun rekomendasi 	Laporan supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	1,11	Laporan supervisi yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> materi dan instrumen supervisi laporan supervisi yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> rencana program supervisi instrumen supervisi instrumen evaluasi daftar periksa (exhaustive activity check list) pelaksanaan supervisi perbaikan (improvement) tindak lanjut/rekomendasi hasil supervisi 	Hard copy/ soft copy laporan supervisi	183	Ahli Utama	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri terkait satu data kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
10.	Melakukan analisis data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Analisis data dan informasi supervisi yang mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> menyusun instrumen supervisi daftar periksa (activity check list) observasi lapangan analisis data kuantitatif dan komparatif analisis data laporan harian, mingguan, dan bulanan 	Laporan analisis untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,59	Laporan identifikasi bahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> materi dan instrumen supervisi analisa data dan informasi supervisi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> analisis data kuantitatif dan komparatif analisis data laporan harian, mingguan, dan bulanan rumusan analisis 	Hard copy/ soft copy dokumen evaluasi dan lelab	184	Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri terkait satu data kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
11.	Melakukan validasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengawasan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Validasi data dan informasi supervisi terkait pembangunan, pelaksanaan, pengendalian, penerapan sistem kegiatan pengawasan jasa kelanjutan yang mencakup kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. observasi/informasi permasalahan perkembangan/progress dan alternatif solusinya b. validasi data dan informasi umum kegiatan c. validasi data dan informasi supervisi per periode harian, mingguan, dan bulanan d. klasifikasi data dan informasi deskriptif 	Laporan hasil validasi data dan informasi untuk supervisi kegiatan pengawasan jasa kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,43	Laporan hasil validasi data dan informasi supervisi memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. validasi data dan informasi umum kegiatan b. validasi data dan informasi supervisi per periode harian, mingguan, dan bulanan c. validasi terhadap penyajian data d. analisis deskriptif/naratif 	Hard copy/soft copy laporan hasil validasi data	185	Abdi Muda	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri terkait satu data kelanjutan dan penarikan b. Peraturan Menteri terkait pengumpulan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
12.	Melakukan identifikasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengawasan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Identifikasi data dan informasi supervisi terkait pembangunan, pelaksanaan, pengendalian, dan penerapan sistem untuk bangunan dan instalasi laut, reklamasi, pemanfaatan air laut, bioteknologi dan bioteknologi, wisata bahari, BMKT, dan sumber daya konvensional yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data kualitatif dan kuantitatif b. pengelompokan/pemilahan data c. penyajian data d. penyusunan laporan 	Laporan identifikasi kegiatan pengawasan jasa dan sumber daya kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	0,34	Laporan identifikasi bahan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. data dan informasi umum kegiatan b. data dan informasi supervisi per periode harian, mingguan, dan bulanan c. resume hasil identifikasi d. penyajian data yang dapat berupa tabulasi data, flow chart, table, atau grafik 	Hard copy/soft copy laporan identifikasi	186	Abdi Pertama	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri terkait satu data kelanjutan dan penarikan b. Peraturan Menteri terkait pengumpulan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
13.	Melakukan perumusan hasil evaluasi dalam kegiatan pengawasan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan	Rumusan hasil evaluasi kegiatan pengawasan jasa kelanjutan terkait rencana pengawasan, pelaksanaan usaha, penyediaan sumber daya dan jasa, dan kerja sama usaha yang mencakup kegiatan:	Dokumen evaluasi kegiatan pengawasan jasa kelanjutan untuk sumber daya kelanjutan,	1,81	Dokumen evaluasi paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. pendahuluan b. kerangka evaluasi c. pemilihan dan penetapan indikator untuk evaluasi d. jenis, metode, dan 	Hard copy/soft copy dokumen hasil evaluasi	187	Abdi Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait pedoman evaluasi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
14.	dan/atau yurisdiksi	<p>a. penyusunan kerangka konsep/kerangka pikir/kerangka kerja</p> <p>b. evaluasi permasalahan/keberhasilan, kesenjangan (GAP analisis), relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan kegiatan</p> <p>c. menyusun rumusan</p>	<p>pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi</p>	0,56	<p>e. mekanisme evaluasi</p> <p>f. evaluasi kegiatan kinerja (GAP analisis) berupa target dan realisasi</p> <p>g. evaluasi pelaksanaan</p> <p>h. evaluasi kebijakan berupa relevansi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan</p> <p>i. menyusun desain pemecahan masalah apabila GAP negatif</p> <p>j. menentukan tindak lanjut</p>	Hard copy/ soft copy laporan hasil analisis data dan informasi	188	Ahli Madya	<p>b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pedoman pengelompokan organisasi di lingkungan KKP</p>
	<p>Melakukan analisis data dan informasi untuk evaluasi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi</p>	<p>Analisis data dan informasi untuk evaluasi kegiatan perusahaan jasa kelautan terkait rencana pengusahaan, pelaksanaan usaha, penyediaan sumber daya dan jasa, dan kerja sama usaha yang mencakup:</p> <p>a. inventarisasi data melalui kuesioner, survei, checklist, review dokumen, wawancara, observasi, FGD, dan studi kasus</p> <p>b. analisis permasalahan/faktor keberhasilan</p> <p>c. analisis kesenjangan (GAP analisis)</p> <p>d. analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan kegiatan</p>	<p>Laporan analisis evaluasi dalam pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi</p>	0,56	<p>Laporan hasil analisis informasi serta penyajian data berupa naratif, flowchart, grafik, dan tabel</p> <p>b. analisis data dan informasi untuk evaluasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> analisis permasalahan/faktor keberhasilan (GAP analisis) analisis kesenjangan (GAP analisis) analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan kegiatan 	Hard copy/ soft copy laporan hasil analisis data dan informasi	188	Ahli Madya	<p>a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional</p> <p>b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pedoman pengelompokan organisasi di lingkungan KKP</p>

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
1	Pengembangan Profesi	A. Perolehan pendidikan formal dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Ijazah/Gelar	25% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	1. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam negeri) 2. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (untuk lulusan luar negeri)

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
		B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	<p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks</p> <p>b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi</p> <p>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan</p>				<p>luar negeri) (untuk lulusan luar negeri)</p> <p>Karya tulis/karya ilmiah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah</p>
				Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang	
				Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang	
				Jurnal/Buku/ Naskah	6,00	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			<p>pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>8,00</p> <p>4,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>	
			<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>8,00</p> <p>4,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>	
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang</p>				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,50	Semua jenjang	
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan/atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang	
			6. Membuat artikel di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan	Artikel	2,00	Semua jenjang	
		C. Perjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:				1. Perjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi disusun

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua jenjang	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua jenjang	2. Terjemahan/ saduran buku dan baban lainnya diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/ pejabat/ instansi/ lembaga yang berwenang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:				3. Terjemahan/ saduran buku dan baban lainnya menggunakan tata bahasa yang baku sesuai ejaan yang benar
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang	4. Terjemahan/ saduran buku dan baban lainnya telah melalui proses editorial sesuai ketentuan yang berlaku
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua jenjang	5. Terjemahan/ saduran buku dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku
		D. Penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya	Membuat standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya	Buku	3,00	Semua jenjang	1. Penyusunan buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
		kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi				<p>bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/pejabat/instansi/lembaga yang berwenang</p> <p>3. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
							<p>pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi disajikan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti</p> <p>4. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disusun secara komprehensif, rinci, dan dapat diterapkan</p> <p>5. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis harus spesifik, efisien, efektif, relevan, dan dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan tugas di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi</p> <p>6. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan fungsional 2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/stu di banding-lapangan 3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan dan memperoleh sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam 4. pelatihan manajerial/sosial kultural	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	0,50 3,00	Semua jenjang Semua jenjang	terdokumentasi dengan baik 1. Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing 2. Memiliki sertifikat tanda tamat dan pendidikan teknis di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 3. Sertifikat diterbitkan secara resmi oleh satuan/ unit/ kerja/ lembaga/ instansi yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan dan memperoleh sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua jenjang	
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua jenjang	
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang	
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua jenjang	
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua jenjang	
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua jenjang	
			5. <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang	
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan	0,50	Semua jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
II.	Penunjang	A. Pengajar/pelatih/	Mengajar/melatih/	Sertifikat/	0,40	Semua	1. Materi disesuaikan

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
	kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah yurisdiksi	pembimbing di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	membimbing yang berkaitan dengan bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan		Jenjang	dengan perkembangan peraturan yang berlaku di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 2. Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti
		B. Keanggotaan dalam tim pemilai/tim uji kompetensi	Menjadi anggota tim pemilai/tim uji kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		C. Perolehan penghargaan/tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	Piagam Piagam Piagam	3,00 2,00 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang	1. Surat keputusan/dokumen/piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 2. Dokumen Penghargaan lainnya yang telah ditandatangani oleh pejabat yang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			a. tingkat internasional	Sertifikat/ Piagam	35% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	berwenang
			b. tingkat nasional	Sertifikat/ Piagam	25% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/ Piagam	15% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	
	D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya		Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan				1. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam negeri)
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5,00	Semua jenjang	2. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (untuk lulusan luar negeri)
			b. Magister	Ijazah	10,00	Semua jenjang	
			c. Doktor	Ijazah	15,00	Semua jenjang	
	E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan		Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan	Laporan	0,04	Semua jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
		tugas . Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	tugas . Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan				dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

C. FORMAT BUKTI FISIK

1. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional PELP Ahli Pertama

Laporan Hasil Identifikasi	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Jenis Data yang di Identifikasi
	d. Metode yang Digunakan
2.	Rumusan Identifikasi Materi (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
3.	Referensi
4.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Laporan Hasil Identifikasi Data dan Informasi	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan/Lokasi
	d. Jenis Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
	e. Metode Identifikasi/Pengumpulan Data
2.	Resume hasil identifikasi/pengumpulan data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
3.	Lampiran Hasil Identifikasi/Pengumpulan Data
4.	Referensi
5.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Data Materi Teknis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Tujuan Survei
	d. Sumber Data/Responden
2.	Identifikasi Permasalahan
3.	Resume hasil identifikasi/pengumpulan data materi teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Lampiran
5.	Referensi
6.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

2. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional APJK Ahli Muda

Laporan Analisis/Dokumen Analisis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Data dan Metode Analisis
3.	Hasil Analisis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Resume
5.	Kesimpulan
6.	Lampiran
7.	Referensi
8.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Basis Data Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Jenis Data dan Analisis Data
3.	Hasil Penyusunan Basis Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Resume Hasil Penyusunan Basis Data
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Laporan Hasil Validasi	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Jenis Data dan Metode Validasi

3.	Hasil Validasi Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Resume Hasil Validasi Data
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

3. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional APJK Ahli Madya

Dokumen Evaluasi Hasil Analisis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Hasil Analisis dan Metode Evaluasi
3.	Dokumen evaluasi hasil analisis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Saran
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Telaah Teknis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Permasalahan
3.	Pernyataan kebijakan (<i>policy statement</i>), memuat:
	a. Tujuan Kebijakan;
	b. Profil Kebijakan yang Dibahas;
	c. Pelaku Kunci kebijakan; dan
	d. Alasan Mengapa Kebijakan Akan Mencapai Sasaran.
4.	Analisis Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan
5.	Dokumen Telaah Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
6.	Kesimpulan dan Saran
7.	Lampiran

8.	Referensi
9.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

4. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama

Dokumen Rencana Kerja Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi hasil analisis
3.	Dokumen Rencana Kerja Pengusahaan Jasa Kelautan (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD))
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Detail Rencana Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi hasil analisis
3.	Dokumen Detail Rencana Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Kelautan (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Konsep Peta Jalan Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang

	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi hasil analisis
3.	Hasil Pengumpulan Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Kriteria Teknis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Dokumen Kriteria Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Rancangan Teknis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Dokumen Rancangan Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Studi Kelayakan Teknis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Dokumen Studi Kelayakan Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Dokumen Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Telaah Teknis	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Permasalahan
3.	Pernyataan kebijakan (<i>policy statement</i>), memuat:
	a. Tujuan Kebijakan;

	b. Profil Kebijakan yang Dibahas;
	c. Pelaku Kunci Kebijakan; dan
	d. Alasan Mengapa Kebijakan Akan Mencapai Sasaran.
5.	Dokumen Telaah Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
6.	Kesimpulan dan Saran
7.	Lampiran
8.	Referensi
9.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Rekomendasi

1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
3.	Hasil Pengumpulan Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Strategi Pengembangan Perusahaan Jasa Kelautan

1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Strategi Pengembangan Perusahaan jasa kelautan (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Neraca Komoditas Pergaraman	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Neraca Komoditas Pergaraman (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Pendampingan Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Dokumen pendampingan pengusahaan jasa kelautan (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Materi Teknis Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
3.	Materi Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran

6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Laporan Supervisi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi Hasil Supervisi
3.	Laporan Hasil Supervisi (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi dengan hasil supervisi)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

Dokumen Evaluasi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kelautan	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi hasil analisis
3.	Dokumen evaluasi kegiatan pengusahaan jasa kelautan (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh APJK dan atasan langsung)

D. HASIL KERJA MINIMAL

NO	JENJANG JABATAN	BUTIR / URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA MINIMAL	PRASYARAT JENJANG (VOLUME)
1.	APJK Ahli Pertama	Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, penyiapan materi teknis/substansi teknis bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.	Data materi teknis/substansi bidang pengusahaan jasa kelautan	2
2.	APJK Ahli Muda	Menyusun kriteria teknis dan analisis data dan informasi materi teknis/substansi teknis bidang jasa kelautan.	Laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa kelautan	2
3.	APJK Ahli Madya	Melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan.	Dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan	2
4.	APJK Ahli Utama	Merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan	Dokumen materi teknis/substansi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan	2

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO